



**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
TIMUR TAHUN 2012-2016**

**SKRIPSI**

oleh  
**Randhu Brilliant Al Farezi**  
**NIM 14081010190**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
TIMUR TAHUN 2012-2016**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

oleh  
**Randhu Brilliant Al Farezi**  
**NIM 140810101090**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Mama Indah Sulistiowati dan Ayahanda Samik Udin yang senantiasa memberikan segala ketulusan cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, do'a yang tiada henti dan pengorbanan selama ini;
2. Kakak ku Sindhu dan adik ku Ale yang selalu memberikan motivasi dan semangat;
3. Keluarga besar dan para sahabat;
4. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMK, dan Bapak/Ibu Dosen yang terhormat di Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, pengalaman dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
5. Almamater yang kubanggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

“Jangan batasi dirimu untuk berteman dengan siapapun. Tapi ingat, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya ”

(Samik Udin)

“Proses pendewasaan itu justru terletak pada proses memilih. Memilih sesuatu yang diyakini benar”

(Abdo El Aziz)

“Bukan masalah banyak atau sedikit hasil dari sesuatu yang kamu kerjakan, tetapi bagaimana cara mu dapat mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan itu”

(Aditya Wardono)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Randhu Brilliant Al Farezi

NIM : 140810101090

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Tingkat Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juli 2018

Yang menyatakan,

Randhu Brilliant Al Farezi  
NIM 140810101090

**SKRIPSI**

**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2016**

oleh  
Randhu Brilliant Al Farezi  
NIM 140810101090

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Aisah Jumiati, S.E., M.P.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Moh. Adenan, M.M.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di  
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016  
Nama Mahasiswa : Randhu Brilliant Al Farezi  
NIM : 140810101090  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Regional  
Tanggal Persetujuan : 17 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Aisah Jumiati, S.E., M.P.  
NIP. 19680926 199403 2 002

Dr. Moh. Adenan, M.M.  
NIP. 19661031 199203 1 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 196411081989022001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Randhu Brilliant Al Farezi

NIM : 140810101090

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan  
gunamemperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Rafael Purতোমো Somaji, M.Si. (.....)  
NIP. 19581024 198803 1 001
2. Sekertaris : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. (.....)  
NIP. 19600412 198702 1 001
3. Anggota : Dr. Zainuri, M.Si. (.....)  
NIP. 19640325 198902 1 001

Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Foto 4 x 6  
Warna

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA  
NIP. 19710727199512101

Analisis Tingkat Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2012-2016

**Randhu Brilliant Al Farezi**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016. Di Indonesia provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, akan tetapi tidak terlepas dari adanya ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat pada PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang sangat berbeda. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang terdiri dari data runtut waktu dari 2012 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Analisis yang digunakan adalah Tipologi Klasen dan indeks Williamson. Dari analisis Tipologi Klasen menunjukkan mayoritas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur termasuk wilayah yang relatif tertinggal sebanyak 21 Kabupaten dan 4 Kota, wilayah maju tapi tertekan sebanyak 2 Kota, wilayah yang sedang tumbuh sebanyak 3 Kabupaten, wilayah yang maju dan tumbuh cepat sebanyak 5 Kabupaten dan 3 Kota. Hasil dari perhitungan indeks Williamson dengan rata-rata ketimpangan sebesar 0.954322122. Nilai tersebut menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan secara umum ketimpangan dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Tipologi Klasen, indeks Williamson.

*Analysis of Inequality Rate Inter Regency / City in East Java Year 2012-2016*

**Randhu Brilliant Al Farezi**

*Departement of Economic and Development Studies, Faculty of Economics and Business, University of Jember*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the imbalance of economic development in the province of East Java year 2012 to 2016. East Java province in Indonesia is a province with high economic growth, but not apart from the inequality of development. This can be seen by the differences of district PDRB and Cities in East Java Province. The data used by researcher is secondary data that consisting of time series data from 2012 until 2016 obtained from Central Statistics Agency of East Java Province. The analysis of this research is Tipology Klasen and Williamson index. The analysis of Klasen Tipology shows for almost Districts / Cities in East Java Province are relatively including left behind, as many as 21 Districts and 4 Cities besides, advanced-depressed regions are 2 Cities, the growing area are 3 Districts, developed and fast growing areas are 5 District and 3 Cities. The results of Williamson index calculation by average inequality of 0.954322122. This value shows a considerable imbalance in the Regency / City in East Java Province and in general inequality from year to year tends to increase.*

*Keywords: Development Inequality, Tipology Klasen, Williamson index.*

## RINGKASAN

**Analisis Tingkat Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016;**Randhu Brilliant Al Farezi,140810101090; 2018: xix+82 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Jember.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk di suatu negara dalam jangka panjang dan di sertai dengan perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010:58). Keberhasilan suatu wilayah dalam proses pembangunan ialah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar pendapatan, antar daerah dan antar sektor. Pertumbuhan dan pembangunan adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, pembangunan merupakan penentu usaha pembangunan berkelanjutan dan tidak memusnahkan sumberdaya asli. Konsep pembangunan ini dikupas secara mendalam oleh teori pembangunan dan pertumbuhan yang melihat kesesuaian dalam konteks wilayah. Pertumbuhan ekonomi ialah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi pada penduduknya (Kuznet dalam Todaro 2006).

Di indonesia provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, akan tetapi tidak terlepas dari adanya ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat pada PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang sangat berbeda.Ada beberapa wilayah dengan tingkat PDRB yang tinggi dan ada pula beberapa dengan PDRB yang rendah. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pola pembangunan ekonomi, hal ini mengakibatkan pola pembangunan di Provinsi Jawa Timur juga tidak seragam. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh terhadap terbentuknya pola pembangunan ekonomi, cepat atau lambatnya suatu pertumbuhan itu menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat klasifikasi wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016 dan untuk melihat seberapa besar ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Tipologi Klasen dan indeks Williamson. Data yang digunakan merupakan data data sekunder yang terdiri dari data runtut waktu dari 2012 sampai 2016. Hasil dari analisis Tipologi Klasen menunjukkan wilayah yang termasuk pada kuadran I (wilayah maju dan tumbuh cepat) yaitu Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu. Wilayah yang termasuk kuadran II (wilayah yang sedang tumbuh) yaitu Kab. Banyuwangi, Kab. Lamongan dan Kab. Sumenep. Wilayah yang termasuk kuadran III (wilayah maju tapi tertekan) yaitu Kota Kediri dan Kota Malang. Wilayah yang termasuk kuadran IV (wilayah relatif tertinggal) yaitu Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Tuban, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto. Hasil dari perhitungan indeks Williamson dengan rata-rata ketimpangan 0.954322122. Nilai tersebut menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan secara umum ketimpangan dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

## PRAKATA

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Aisah Jumiati, S.E., M.P selaku dosen pembimbing utama yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan prioritas kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat dengan cepat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Moh. Adenan, M.M selaku dosen pembimbing anggota yang memberikan motivasi, dukungan dan kesabaran kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini secara baik;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomidan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung;
4. Ibu Dr. Lilis Yuliati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomidan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang banyak memberikan masukan dari segi akademik, sosial dan pelajaran kehidupan kepada penulis;
5. Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomidan Studi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama kuliah;

6. Bapak Dr. Rafael Purতোমো Somaji, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan banyak pelajaran kehidupan, semangat, arahan selama kuliah dan motivasi yang selalu penulis ingat yaitu “*The First Is Team Work*”;
7. Bapak Fajar Wahyu S.E., M.E selaku dosen pengampu matakuliah yang memberikan dukungan, semangat dan memberikan banyak pengetahuan diluar akademik kepada penulis selama proses berlangsung;
8. Bapak Aditya Wardhono, S.E., M.Sc., P.hD selaku dosen yang telah mengajarkan untuk berfikir *Out of The Box* dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda;
9. Bapak Dr. M. Miqdad, S.E., M.M.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak kesempatan kepada penulis untuk terus berkarya;
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
11. Orang Tua terbaik, ayahanda Samik Udin dan ibunda Indah Sulistiowati yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan tanpa henti untuk penulis;
12. Kakak ku Sindhu Arya Wiguna dan adek ku Ale Vian Gaiska Alkhofidhu beserta keluarga besar, terimakasih telah memberikan dukungan serta arahan yang baik dalam kelancaran penulisan skripsi ini;
13. Ayah Abdo El Aziz selaku orang tua angkat yang dengan sabar dan ikhlas memberikan dukungan kepada penulis dalam segala hal;
14. Sahabat-sahabatku tersayang Vivit Puji Astuti, Alwan Habibi Mushlih, Azizah Ummul Choiroh, dan Abdullah Al Ardani yang dengan tulus menjadi saudara penulis selama kuliah berlangsung;
15. Teman seminar proposal ku Livia Ayu yang pada saat itu penuh drama dan penuh kekhawatiran gagal untuk seminar tanggal 06 April 2018, juga Siti Merlina Idriani yang telah membantu penulis dalam pembuatan Abstrak;

16. Ahmad Sodiq yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan utamanya memberikan tumpangan istirahat di kos jalan Mastrip 7.
17. Seluruh kawan seperjuangan di program studi S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2014;
18. Diva Nastiti Prameswari yang telah memberikan cinta, kasih sayang, semangat, pengorbanan dan banyak hal yang diberikan utamanya meminjamkan laptop dalam penyusunan skripsi ini;
19. Teman-teman perintis UKM Marching Band Symphony Rama Universitas Jember yang telah memberikan ilmu tentang arti sebuah jeripayah dan semangat perjuangan;
20. Teman-teman KKN tematik DESBUMI 92 Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, terimakasih telah memberikan sebuah pengalaman hidup berupa kebersamaan, kekeluargaan dan solidaritas;
21. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 13 Juli 2018

Penulis

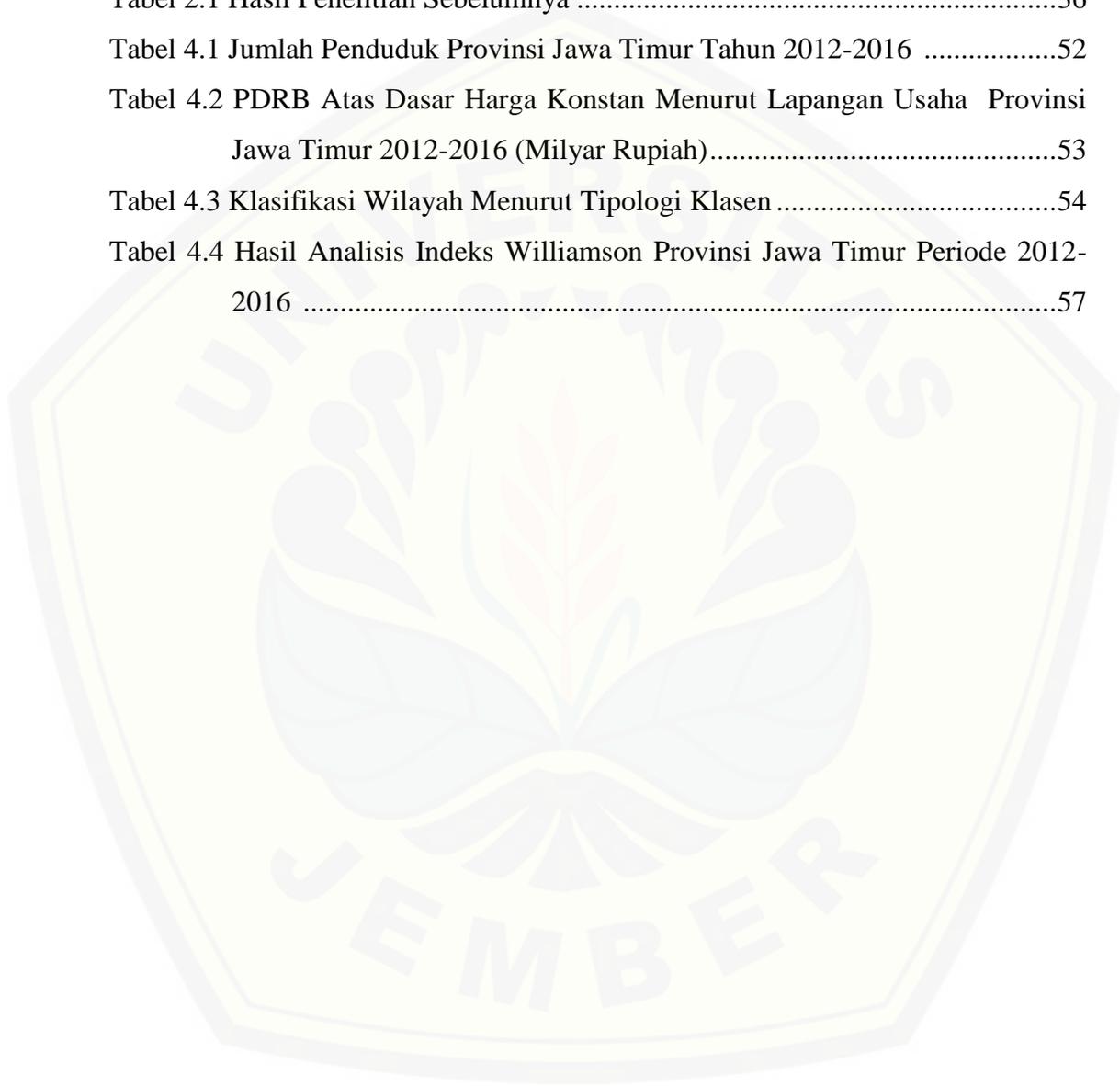
**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAM PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>PRAKATA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1. Landasan Teori</b> .....	7
2.1.1. Ketimpangan Ekonomi Wilayah .....	7
2.1.2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah .....	9
2.1.3. Konsep Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah .....	12
2.1.4. Teori Dualisme Ekonomi .....	20
2.1.5. Teori Pembangunan Ekonomi .....	23
2.1.6. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	26
<b>2.2. Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya</b> .....	30
<b>2.3. Kerangka konsep</b> .....	44
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	46

<b>3.1.</b>	<b>Rancangan Penelitian</b>	46
3.1.1.	Jenis Penelitian	46
3.1.2.	Waktu dan Tempat Penelitian	46
3.1.3.	Jenis dan Sumber Data	46
<b>3.2.</b>	<b>Metode Analisis Data</b>	47
3.2.1.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tipology Klassen	47
3.2.2.	Analisis Ketimpangan Regional	48
<b>3.3.</b>	<b>Definisi Oprasional Variabel</b>	49
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		50
<b>4.1.</b>	<b>Gambaran Umum Objek Penelitian</b>	50
4.1.1.	Kondisi dan Letak Geografis Provinsi Jawa Timur	50
4.1.2.	Kependudukan Provinsi Jawa Timur	51
4.1.3.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur	52
<b>4.2.</b>	<b>Hasil Analisis Data</b>	54
4.2.1.	Hasil Analisis Tipologi Klasen	54
4.2.2.	Hasil Analisis Indeks Wiliamson Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016	56
<b>4.3.</b>	<b>Pembahasan</b>	58
4.3.1.	Analisis Tipologi Klasen	59
4.3.2.	Indeks Williamson	62
<b>BAB 5. PENUTUP</b>		67
<b>5.1.</b>	<b>Kesimpulan</b>	67
<b>5.2.</b>	<b>Saran</b>	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		69
<b>LAMPIRAN</b>		72

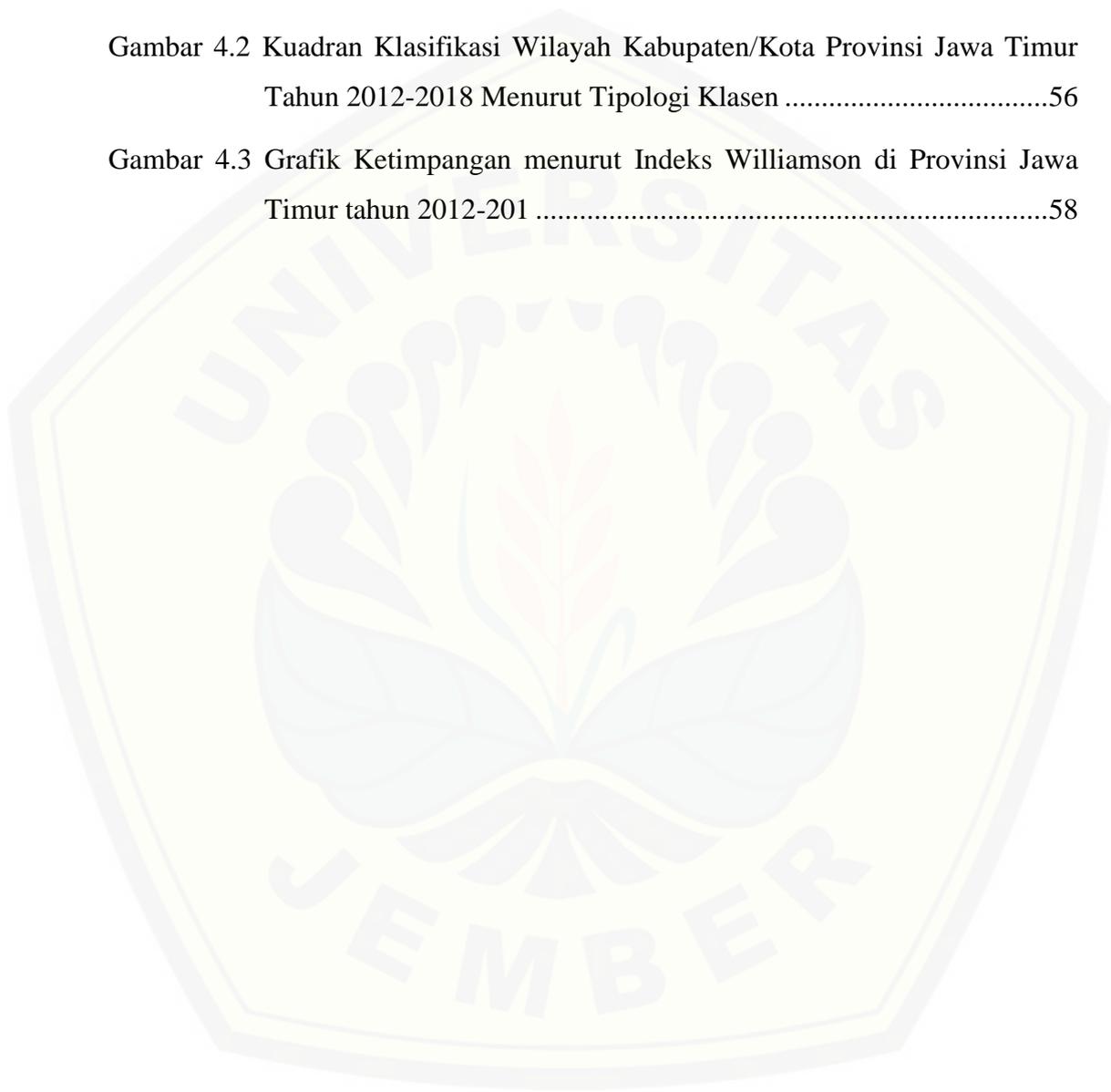
**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Timur 2012-2016, Atas Dasar Harga Konstan 2010 .....	5
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya .....	36
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016 .....	52
Tabel 4.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur 2012-2016 (Milyar Rupiah).....	53
Tabel 4.3 Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klasen .....	54
Tabel 4.4 Hasil Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016 .....	57



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	44
Gambar 4.1 Peta Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.....	50
Gambar 4.2 Kuadran Klasifikasi Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018 Menurut Tipologi Klasen .....	56
Gambar 4.3 Grafik Ketimpangan menurut Indeks Williamson di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-201 .....	58



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2016 (Km2)	72
Lampiran B Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2012-2016 (Ribu Jiwa).....	73
Lampiran C PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) .....	74
Lampiran D Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota 2012-2016 (%).....	75
Lampiran E PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah).	76
Lampiran F Hasil Perhitungan Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klasen....	77
Lampiran G Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Periode 2012 .....	78
Lampiran H Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Periode 2013 .....	79
Lampiran I Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Periode 2014 .....	80
Lampiran J Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Periode 2015 .....	81
Lampiran K Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Periode 2016 .....	82

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Oleh karena itu tujuan dari pembangunan itu sendiri utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berhasil tidaknya pembangunan suatu daerah bisa ditinjau dari laju pertumbuhan ekonominya. Proses di dalam pembangunan ekonomi setiap daerah selalu menentukan target tertinggi dalam tujuan pembangunan dan perencanaan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh daerah dikatakan berhasil dan baik ketika tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada apa yang telah dicapai pada masa yang sebelumnya. Semakin tinggi pendapatan suatu masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam sebuah pembangunan pasti terdapat permasalahan yang dihadapi untuk menyusun strategi dasar, dimana sebuah daerah akan dihadapkan sebuah pilihan yaitu memprioritaskan pemerataan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi yang akan ditingkatkan. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa prioritas pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak lagi dipakai dalam mengurangi kemiskinan, sementara kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara sedang berkembang, begitu sebaliknya di negara maju meningkatkan pendapatan dari segala kegiatan ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Tingginya ekonomi suatu daerah belum tentu menunjukkan

pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat merupakan sebuah strategi tepat dalam proses pembangunan ekonomi. Pentingnya pembangunan ekonomi bukanlah bertujuan untuk menciptakan modernisasi masyarakat, melainkan menciptakan sebuah kehidupan yang layak dan lebih baik dalam seluruh masyarakat tersebut. Oleh karena itu kegiatan ataupun usaha-usaha dalam proses pembangunan harus dapat diketahui oleh masyarakat. Tujuan itu tidak akan pernah tercapai apabila distribusi pendapatan masyarakat semakin buruk, dengan demikian hanya golongan tertentu saja yang akan menikmati hasil pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berjalan dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian bisa dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat dari pada kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dibanding periode waktu sebelumnya (Sukirno, 1996:15). Indikator penting yang dapat melihat pertumbuhan di suatu wilayah adalah data PDRB dalam satu periode tertentu apabila suatu masyarakat dinilai mengalami penambahan dalam kemakmuran yang tercermin oleh pendapatan perkapita masyarakat menurut harga konstan atau pendapatan perkapita riil terus menerus bertambah. Laju pertumbuhan PDRB disumbang oleh sembilan (9) sektor, sektor; yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalan ; industri pengolahan ; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pangangkutan dan komunikasi ; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ; dan jasa-jasa.

Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah merupakan hal yang sangat penting dalam mempercepat realisasi pembangunan di suatu daerah (Sjafrizal,2008). Namun kendalanya selalu ditemukan koordinasi antar kepala daerah yang kuran berjalan efektif bahkan sering terjadi konflik kepentingan antar kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota memiliki keinginan yang berbeda dan cenderung pula memaksakan kehendaknya sehingga terjadi ketidak sinkronan yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah atau daerah. Kondisi ini dibutuhkan pengelompokan akan kebutuhan dari masing-masing wilayah

sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terkait satu dengan yang lain dan terciptanya pembangunan yang efektif juga efisien. Lebih baik pula ketika antar kepala daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Perencanaan yang strategis, jelas, terarah, dan mewakili semua kepentingan wilayah dibutuhkannya integrasi dan sinkronisasi.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Laju pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan maka hal ini dapat menciptakan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah atau yang disebut dengan regional disparity tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju, wilayah yang terbelakang, dan wilayah kurang maju ini dikarenakan kurang memperhatikannya apakah pertumbuhan di suatu wilayah tersebut pertumbuhan lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduknya atau pertumbuhan struktur ekonomi.

Dualisme ekonomi regional merupakan salah satu pemicu terciptanya ketimpangan antar wilayah, Pengertian dualisme itu sendiri adalah Dua keadaan yang berbeda dimana satu keadaan bersifat Superior dan keadaan lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama (J.H. Boeke dalam Taryono, 2014). Dualisme regional di negara sedang berkembang dibedakan menjadi dua jenis yaitu dualisme antara daerah perkotaan dan pedesaan dan dualisme antara pusat negara, pusat industri dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dalam negara tersebut. Kedua jenis dualisme tersebut timbul terutama sekali sebagai akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dengan daerah pertanian (pedesaan). Ketidakseimbangan tersebut akhirnya menyebabkan kesenjangan antara pusat negara dengan daerah-daerah lainnya dan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan bertambah besar.

Ketimpangan wilayah merupakan permasalahan yang tidak bisa terlepas dalam proses pembangunan. Ardani (dalam Denny Iswanto, 2015) ketimpangan yang sering dibahas adalah ketimpangan ekonomi, ketimpangan ekonomi ini secara wajar akan terjadi dalam proses pembangunan ekonomi di masing-masing

wilayah. Meskipun pada dasarnya kesenjangan dalam pembangunan ekonomi adalah inherent dengan proses pembangunan itu sendiri. Ketimpangan ekonomi sering dipergunakan untuk indikator perbedaan pendapatan perkapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah.

Kesenjangan atau disparitas pembangunan regional merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan secara umum lebih lebar terjadi pada negara-negara kurang maju dari pada yang terjadi pada negara-negara maju. Keberagaman karakteristik dan heterogenitas dalam suatu wilayah menyebabkan kecenderungan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi di suatu daerah. Keberagaman karakteristik ini yang akan mempengaruhi kemampuan laju percepatan tumbuh dan berkembangnya suatu daerah yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sedangkan wilayah yang lain tumbuh dengan lambat. Kemudian, pertumbuhan yang berbeda inilah yang akan mengakibatkan terjadinya sebuah ketimpangan dari daerah satu dengan daerah lain. Namun, dari sudut pandang pembangunan nasional menunjukkan ketimpangan pembangunan ini sangatlah tidak sesuai karena menimbulkan sebuah kerugian daripada keuntungan atau manfaat.

Di Indonesia provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, akan tetapi tidak terlepas dari adanya ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat pada PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang sangat berbeda. Ada beberapa wilayah dengan tingkat PDRB yang tinggi dan ada pula beberapa dengan PDRB yang rendah. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pola pembangunan ekonomi, hal ini mengakibatkan pola pembangunan di Provinsi Jawa Timur juga tidak seragam. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh terhadap terbentuknya pola pembangunan ekonomi, cepat atau lambatnya suatu pertumbuhan itu menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah.

Jawa Timur terletak berdampingan dengan provinsi besar yang berada di pulau Jawa lainnya, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat yang notabennya memiliki

potensi sumberdaya alam dan manusia yang relatif sama. PDRB Jawa Timur cukup bersaing dengan Provinsi lainnya di Jawa dan berkontribusi cukup besar terhadap PDRB Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tabel 1 yang terus meningkat. Selain itu data dari tahun ke tahun dihitung dari 2012 secara berkelanjutan sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan dilihat dari nilai pertumbuhan PDRB Jawa Timur tanpa adanya penurunan nilai PDRB tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Timur telah terjadi proses pembangunan ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Timur 2012-2016, Atas Dasar Harga Konstan 2010

Tahun	PDRB (Milliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2012	1124464,6	6.64
2013	1192789,8	6.07
2014	1262684,5	5.85
2015	1331395	5.44
2016	1405236,1	5.54

(Sumber: BPS Jawa Timur, Produk Domestik Regional Bruto tahun 2012-2016)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2016 jumlah PDRB mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Ditinjau dari pertumbuhan PDRB Jawa Timur di setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 nilai pertumbuhan 6,64% dan ditutup pada tahun 2016 dengan pertumbuhan 5,54%. Masalah ketimpangan antar Kabupaten/Kota menjadi prioritas utama sebagai sasaran pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak serta merta mampu menggambarkan kesejahteraan yang benar-benar terjadi di dalamnya, akan tetapi PDRB ini merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Jika semakin tinggi nilai PDRB perkapita di suatu daerah maka dapat di artikan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan

masyarakatnya. Begitu pula sebaliknya apabila PDRB semakin rendah maka bisa diartikan semakin rendah pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisa sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi dan faktor apa saja yang menjadi pendorong ketimpangan regional antar kabupaten dengan judul : “ Analisis Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah klasifikasi wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016?
2. Seberapa besarkah ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui klasifikasi wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016.
2. Untuk melihat seberapa besar ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Sebagai tambahan pengetahuan wawasan akan pengetahuan baik teori maupun pengaplikasiannya dengan fenomena ekonomi yang sebenarnya.
2. Bagi Akademisi Sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan dibidang ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008).

Menurut Hipotesa Neo-klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka kemudian secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008).

Tiga faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan yaitu faktor alami, kondisi sosial, dan keputusan-keputusan kebijakan. Faktor alami ini meliputi lokasi, geografis, wilayah potensial untuk pembangunan ekonomi. Sementara faktor sosial budaya meliputi nilai tradisi, norma, inovasi, kewirausaha, dan mobilitas ekonomi. Sedangkan faktor keputusan kebijakan merupakan kebijakan yang mendukung secara langsung maupun tidak terjadinya ketimpangan (Nugroho, 2004).

Pada semua negara tanpa melihat ukuran dan tingkat pembangunannya, ketimpangan pembangunan ini merupakan masalah daerah yang tidak merata. Dalam konteks makro ketimpangan ini pada akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan yang sangat merugikan dalam proses pembangunan yang ingin di capai setiap negara. Ketimpangan dan ketidak seimbangan pembangunan mengakibatkan struktur hubungan antar wilayah yang membentuk interaksi yang saling melemahkan. Wilayah/kawasan hinterland menjadi lemah karena

pengurasan sumberdaya yang berlebihan (*backwash*) yang mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi nilai tambah di pusat-pusat pembangunan secara berlebihan. Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) memperluas dan dampak sebar (*spread effect*) cenderung menyempit. Kecenderungan ini secara kumulatif memperburuk ketimpangan internasional dan juga menyebabkan ketimpangan pada regional di antara negara-negara terbelakang (Jhingan, 1990).

Masalah ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam suatu pembangunan daerah. Ketimpangan tersebut akan memberikan dorongan terhadap daerah yang terbelakang untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar dapat setara bahkan lebih dari daerah sekitarnya. Selain itu, daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga masalah ketimpangan dalam hal ini memberikan dorongan pada hal yang positif. Namun adapula dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta masalah ketimpangan yang tinggi dipandang tidak adil pada umumnya (Todaro, 2006).

Menurut Todaro, gambaran ketimpangan terlihat pada hubungan antara tingkat pendapatan perkapita dan tingkat ketimpangan pendapatan negara sedang berkembang dan negara maju. Gambaran ketimpangan pendapatan negara tersebut dikelompokkan dan disesuaikan menurut tinggi, sedang, dan rendahnya tingkat pendapatan yang diukur melalui koefisien gini dan tingkat PDRB.

Ketidakmerataan antar regional berhubungan dengan proses pembangunan nasional. Berdasarkan hasil penelitiannya secara empiris terhadap sifat-sifat ketidakmerataan secara spasial di dalam suatu batas wilayah secara nasional, suatu hal yang wajar ketika terdapat perbedaan yang absolut antara wilayah miskin dan wilayah kaya dengan wilayah yang tetap muncul bahkan jumlahnya bertambah. Keterkaitan ekonomi unit-unit regional dengan negara miskin tampaknya semakin kuat dibandingkan antar daerah yang umum digunakan sebagai mengukur ketimpangan dengan mengukur ketimpangan pendapatan daerah dalam suatu nilai

ketimpangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan antar wilayah yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang, faktor produksi daerah, serta alokasi investasi antar wilayah satu dengan yang lainnya. Sehingga kebijakan yang dijalankan oleh suatu daerah mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional. Williamson (dalam Ernan 2018).

### 2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat daerah mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu (Lincoln Arsyad, 1999). Saat ini tidak ada suatu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komperhensif. Namun demikian ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori tersebut berkisar pada metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tertentu. Secara Umum pendapat-pendapat yang mendasari bidang teori pembangunan ekonomi regional yang masing-masing mempunyai asumsi yang berbeda yaitu sebagai berikut :

#### a. Model Neo Klasik

Model Neo Klsik mendasarkan analisa pada peralatan fungsi produksi, sama halnya dengan analisis pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok NeoKlasik berpendapat bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi. Namun demikian ada kekhususnya teori pertumbuhan regional Neo Klasik yaitu membahas secara mendalam pengaruh dari perpindahan penduduk/migrasi dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kesimpulan dari model Neo Klasik adalah terdapat hubunganantara pertumbuhan dari suatu negara dengan perbedaan

kemakmuran daerah (regional disparity) pada negara yang bersangkutan. Kelompok Neo Klasik mengatakan bahwa pada saat proses pembangunan baru dimulai (negara yang sedang berkembang), tingkat perbedaan kemakmuran antara wilayah cenderung menjadi tinggi (*divergence*). Ketika proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama (negara yang telah berkembang) maka perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah cenderung menurun (*convergen*). Alasan dikemukakan adalah bahwa lalu lintas orang dan lalu lintas modal di negara yang sedang masih belum lancar sehingga proses penyesuaian ke arah tingkat keseimbangan pertumbuhan belum dapat terjadi. Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi serta masih kuatnya tradisi yang menghalangi mobilitas penduduk, biasanya merupakan faktor utama yang menyebabkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan modal antar daerah. Sedangkan di negara-negara maju, proses penyesuaian tersebut terjadi dengan lancar karena telah tersedianya fasilitas perhubungan dan komunikasi. Kebenaran pendapat ini mula-mula diselidiki secara empiris oleh Williamson (1965).

b. Model Penyebab Kumulatif

Teori ini pada mulanya dikemukakan oleh Myrdal (1957) yang mengkritik teori Neo Klasik mengenai pertumbuhan yang stabil. Myrdal menyatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar wilayah selamanya akan menimbulkan adanya *bachwas effect* yang mendominasi *spread effect* dan pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak ekulibrium (*disequilibrium*). Perbedaan utama dari teori *Neo Klasik* dan teori dari Myrdal adalah, yang pertama menggunakan *constant return to scale* dan kedua menggunakan *increasing return to scale*. Perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah mungkin akan menjadi sangat besar jika *increasing return to scale* berlangsung terus. Menurut Kaldor (1970) bahwa prinsip-prinsip dari penyebab kumulatif adalah penyederhanaan dari *increasing return to scale* di perusahaan. Kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung

memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lain. Hal ini disebut Myrdal sebagai *backwash effects*. Berdasarkan kondisi ini maka penganut teori Cumulative Causation berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar, sehingga perlu dilakukan melalui campur tangan yang efektif dari pemerintah.

c. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi, biasa disebut analisis basis digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan yang berasal dari sektor basis pendapatan regional akan langsung meningkat bila sektor basis mengalami perluasan, sedangkan kesempatan kerja baru terasa dalam jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Keunggulan dari metode ini adalah dapat secara cepat mengetahui sektor-sektor yang menjadi andalan/basis komparatif suatu perekonomian daerah. Kelemahan model ini adalah didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

d. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral menanggapi bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral

tersebut merupakan suatu permukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

### 2.1.3 Konsep Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah

Thee Kian Wie, (1981) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi :

- a. Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (size distribution income);
- b. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (urban-rural income disparities);
- c. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (regional income disparities).

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Williamson, 1965). Analisis yang menghubungkan tahap pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan serta ungkapan pertumbuhan versus pemerataan sebenarnya dipicu oleh sebuah penemuan yang dimulai oleh Simon Kuznet (1955). Simon Kuznet menghubungkan laju pertumbuhan berbagai negara maju dan negara sedang berkembang dengan mengamati data time series untuk Amerika, Inggris dan Jerman serta data cross section yang mencakup tiga negara tersebut ditambah India, Srilangka serta Puerto Rico dan pada hasil pengamatan tersebut Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik. Pola tersebut mensyaratkan bahwa pada tahap awal perkembangan (diwakili oleh PDB per kapita yang masih rendah), maka proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Pembangunan dengan hasil seperti yang digambarkan oleh hipotesis U terbalik, sebagian besar didasarkan pada model pembangunan Dualistik. Model pembangunan dualistik ini (Suharto, 2001) berdasarkan artikel terkenal tentang ekonomi surplus tenaga kerja dari Artur Lewis, yang memperbaharui model kalsik. Menurut model

pembangunan-pembangunan yang diajukan Lewis (Todaro, 1999), perekonomian terbelakang terdiri 2 sektor yaitu :

- a. Sektor tradisional yaitu sektor pedesaan sub sistem yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol. Hal ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu fakta bahwa sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian dan sektor tersebut tidak akan kehilangan outputnya sedikitpun.
- b. Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsistem. Perhatian utama dari model ini diarahkannya pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern. Adapun laju atau kecepatan terjadinya perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi dibanding industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern.

Peningkatan investasi itu sendiri dimungkinkan oleh adanya kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah dengan asumsi para kapitalis yang berkecimpung dalam sektor modern tersebut bersedia menanamkan kembali seluruh keuntungannya. Hal ini dapat meningkatkan pangsa keuntungan pada pendapatan nasional. Tingkat upah di sektor industri perkotaan (sektor modern) diasumsikan konstan dan berdasarkan suatu premis tertentu, jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah sektor pertanian subsisten tradisional (Todaro, 1999).

Distribusi fungsional berpindah dari penghasilan upah. Pola distribusi berbentuk U dari permulaan dan lebih lanjut tidak ada trade off antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan hanya menentukan berapa cepat sebuah negara melewati U. Teori Lewis ini kemudian disempurnakan oleh

Gustav Ranis dan John Fei. Model pembangunan ekonomi Ranis-Fei (Jhingan, 2000) bukan saja terperinci menunjukkan pengaruh dari perubahan produktivitas tenaga kerja di sektor modern kepada corak proses pembangunan akan tetapi menunjukkan juga akibat kemajuan tingkat produktivitas kegiatan-kegiatan di sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi yang akan tercipta. Di dalam mengemukakan teorinya Fei dan Rei membuat asumsi sebagai berikut :

- a. Terdapat sektor pertanian tradisional yang pasif dan industri yang aktif;
- b. Output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja;
- c. Di sektor modal tidak terdapat akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali;
- d. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap;
- e. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (return to scale) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel;
- f. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol, Jika penduduk melampaui jumlah dimana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi output pertanian;
- g. Output sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh saja;
- h. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen;
- i. Upah nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian, yang disebut upah institusional;
- j. Pekerja masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk-produk pertanian.

Berdasarkan asumsi tersebut maka Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja menjadi 3 tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama, para penganggur tersamar, yang tidak menambah output pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.

- b. Tahap kedua, pekerja pertanian menambah output pertanian tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh. Para pekerja ini dialihkan ke sektor industri. Jika migrasi pekerja ini berlangsung terus, akan dicapai suatu titik dimana pekerja pertanian menghasilkan output yang sama dengan upah institusional.
- c. Tahap ketiga, dan merupakan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Pada tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dari sektor pertanian menuju komersial.

Kuznet menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern. Banyak penelitian susulan yang mencoba membantah atau mendukung penemuan Kuznets tersebut. Satu dekade setelah adanya hipotesa Kuznet, Williamson membuat suatu langkah dengan menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat region di suatu negara. Williamson (1965) menjadi orang pertama yang mencoba membuktikan hipotesis U terbalik dengan menggunakan data antar wilayah. Dengan mendasarkan analisisnya pada pengalaman empiris di 24 negara selama kurun waktu 1950-1960, ia membuktikan bahwa kesenjangan antar wilayah akan memberikan pengaruh negatif pada kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Williamson juga menjelaskan hipotesa U terbalik pada lingkup wilayah bahwa pada saat pendapatan-perkapita meningkat, akan terjadi peningkatan kesenjangan wilayah, lalu bertahan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menurun. Implikasi yang dapat diturunkan bahwa ketimpangan pendapatan antar regional merupakan konsekuensi dari pembangunan dan akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan kedewasaan pembangunan itu sendiri. Williamson menganalisa empat faktor yang mendasari pola U terbalik dalam pengembangan wilayah yaitu : sumber daya alam, perpindahan tenaga kerja, perpindahan modal, kebijakan pemerintah pusat.

Williamson menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya alam yang berbeda akan menimbulkan pertumbuhan wilayah yang tidakseimbang pada tahap awal pembangunan. Robinson (1976) dengan hipotesa-U terbalik menyimpulkan bahwa kekuatan hukum ekonomi akan menyeimbangkan kesenjangan antar daerah.

Menurut teori Neo Klasik ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut dapat mencapai keseimbangan kembali dengan sendirinya, karena daerah-daerah tertinggal akan dengan sendirinya konvergen dengan daerah yang lebih maju. Para ekonom Neo Klasik seperti Solow (1956), Suan (1956) dan Meade (1961) mengajukan model pertumbuhan dengan menggunakan beberapa asumsi (Sadono Sukirno, 1981) sebagai berikut (1) Full employment; (2) Persaingan sempurna; (3) Komoditi Homogen; (4) Ongkos transportasi nol; (5) Constant return to scale antar wilayah; (6) Supply tenaga kerja tetap; (7) Tingkat teknologi tetap; Berdasarkan asumsi tersebut, maka tingkat upah merupakan fungsi langsung dari rasio kapital dan tenaga kerja, sehingga akan terjadi pergerakan tenaga kerja dari daerah yang tingkat upahnya rendah ke daerah yang tingkat upahnya tinggi. Sementara modal bergerak sebaliknya (Esther Kembang, 2008).

Kekuatan konvergensi potensial lainnya (Glasson, 1990) antara lain alokasi sumber daya di daerah yang berangkat dari sektor upah rendah (seperti sektor pertanian) ke sektor dengan upah yang tinggi, dengan produktivitas tinggi akan menaikkan pendapatan rata-rata perkapita serta adanya ciri-ciri kematangan dalam daerah-daerah yang sudah lama berpendapatan tinggi yang dapat memperlambat kenaikan pendapatan perkapita di masa mendatang.

Salah satu kelompok hibrida dari teori pertumbuhan regional yang jelas-jelas mengakui bahwa pertumbuhan regional itu mungkin saja bersifat divergen dan bukannya konvergen, adalah teori-teori centre-periphery dari Hirschman, Friedman dan Myrdal (Glasson, 1990). Myrdal dan Hirschman dalam teorinya tentang kesenjangan pembangunan ekonomi menyatakan bahwa kekuatan divergensi adalah lebih kuat daripada kekuatan konvergensi dalam pola pertumbuhan ekonomi. Argumen umum dari teori dapat dijelaskan dengan membandingkan peruntangan dari dua daerah, A dan B. Pada mulanya daerah A berkembang lebih cepat daripada B, karena ia mempunyai kemanfaatan-

kemanfaatan alamiah dan/atau buatan manusia. Akan tetapi bertentangan dengan banyak teori pertumbuhan, divergensi ini mungkin tidak akan hilang dengan sendirinya dan proses ini malahan dapat menjadi kumulatif, dimana yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Menurut Myrdal (Sadono S, 1981) dalam jangka panjang pendapatan perkapita antar daerah cenderung timpang. Perbedaan tersebut menurutnya disebabkan adanya dua faktor yaitu backwash effect dan spread effect. Pembangunan ekonomi antar wilayah akan menimbulkan adanya backwash effect yang mendominasi spread effect dan pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak ekuilibrium. Spread effect adalah kekuatan yang menuju konvergensi antara daerah-daerah kaya dan daerah-daerah miskin. Dengan bertumbuhnya daerah kaya, maka bertambah pula permintaannya terhadap produk dari daerah yang tertinggal seperti hasil pertanian dan hasil industri barang konsumsi, dengan demikian akan yang menimbulkan pertumbuhan. Myrdal menyatakan sebab-sebab kurang mampunya daerah terbelakang berkembang secepat daerah yang maju. Hal tersebut disebabkan karena keadaan backwash effect, yang menyebabkan daerah terbelakang menghadapi lebih banyak hambatan dalam mengembangkan ekonominya. Dari masa ke masa daerah yang lebih maju akan menjadi daya penarik bagi penduduk daerah terbelakang, untuk mengadakan migrasi karena adanya keyakinan untuk mendapatkan gaji yang lebih baik/ prasarana sosial yang lebih baik di daerah yang lebih maju.

Pada umumnya yang melakukan migrasi adalah kaum muda, berpendidikan dan berpengalaman cukup dan dengan demikian yang tertinggal di daerah terbelakang adalah golongan penduduk yang tingkat kecakapan maupun produktivitas rendah sehingga menyebabkan potensi yang lebih terbatas dalam menggalakkan pembangunan. Demikian pula karena ketidakterediaan institusi finansial dan prospek investasi yang suram akan menggiring kapital keluar menuju daerah yang maju. Berdasarkan keadaan ini, maka penganut teori Cumulative Causation berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar, sehingga perlu dilakukan melalui campur tangan yang aktif dari pemerintah.

Hirschman berkeyakinan bahwa terjadinya konsentrasi pembangunan disebabkan oleh faktor-faktor di daerah maju yang mempengaruhi dan menghambat pembangunan di daerah tertinggal. Faktor-faktor yang menghambat itu dinamakan *polarization effect*, namun juga terdapat kekuatan yang bersumber di daerah maju yang akan mempengaruhi pembangunan di daerah tertinggal yang disebut *tricking down effect*, tetapi kekuatan ini biasanya jauh lebih rendah daripada *polarization effect*.

Sementara Freedman's (1966) menyatakan bahwa atas dasar kenyataan pada sejarah proses pembangunan spasial menekankan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai kecenderungan untuk berkonsentrasi pada suatu daerah yang diawali oleh arus urbanisasi yang kemudian diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana. Perroux menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak merata terjadi di berbagai daerah, tetapi mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan dan hal ini akan menentukan perkembangan ekonomi daerah lain yang lebih lambat perkembangannya.

Teori Pusat Pengembangan (*Growth Poles Theory*) akan dapat merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruhan pelosok daerah (Sjafrizal, 1983:15). Teori ini dapat menggabungkan kebijakan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan secara terpadu. Menurut Perroux, konsep *pole de croissance* lebih banyak menyangkut konsep *economic region* daripada *geographic region*. Karena itu suatu pusat pengembangan seringkali didefinisikan sebagai suatu konsentrasi industri pada suatu tempat tertentu yang kesemuanya saling berkaitan melalui hubungan input dan output industri utama. Konsentrasi dan saling keterkaitan adalah merupakan dua faktor penting dalam setiap pusat pengembangan karena melalui faktor ini akan dapat diciptakan berbagai bentuk *agglomeration economies* yang dapat menunjang pertumbuhan dari industri-industri yang bersangkutan melalui penurunan ongkos produksi. Keuntungan aglomerasi yang merupakan kekuatan dari setiap pusat pengembangan dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Scale economies yaitu semacam keuntungan yang dapat timbul karena pusat pengembangan memungkinkan perusahaan industri yang tergabung di dalamnya beroperasi dalam skala besar, karena ada jaminan bahan baku dan pasar.
- b. Locatization economies yang dapat timbul akibat adanya keterkaitan antar industri, sehingga kebutuhan bahan baku dan pemasaran dapat dipenuhi dengan mengeluarkan ongkos angkut yang minimum.
- c. Urbanization economies yang timbul karena fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi dapat dipergunakan secara bersama sehingga pembebanan ongkos untuk masing-masing perusahaan industri dapat dilakukan serendah mungkin. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa bila kegiatan ekonomi yang saling berkaitan dikonsentrasikan pada suatu tempat tertentu maka pertumbuhan ekonomi dari daerah yang bersangkutan dapat ditingkatkan lebih cepat dibandingkan kalau tersebar dan berpencar. Dengan demikian bila pusat pengembangan didirikan pada suatu daerah yang relatif masih kurang berkembang dibandingkan daerah-daerah lainnya maka laju pertumbuhan pada daerah yang bersangkutan dapat ditingkatkan sehingga perbedaan kemakmuran antar wilayah secara bertahap akan tercapai. Akan tetapi kebijaksanaan tersebut tidak jarang malah menimbulkan kepincangan pembangunan wilayah yang makin tinggi.

Kebijaksanaan pusat pengembangan yang dilakukan oleh suatu negara dapat dikatakan berhasil dari segi pandangan nasional tetapi gagal dalam dari sudut pembangunan wilayah. Kebijakan pusat pengembangan yang hanya tertuju pada beberapa tempat saja bila tidak hati-hati dapat memperbesar jurang kemakmuran antara penduduk yang berada di dalam pusat dan dengan yang berada di luarnya.

Teori Hechsher-Ohlin (Esther Kembauw, 2008) yang dikenal sebagai teori H-O menjelaskan pula penyebab kesenjangan antar daerah. Hechsher-Ohlin mencoba menjawab mengapa perdagangan cenderung pada suatu wilayah tertentu

dan menuju pada polarisasi. Hechsher-Ohlin percaya pada endowment factor yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga daerah mempunyai comparative advantage dibanding yang lain dan ini dapat menaikkan pendapatan daerah tersebut. Hilhorst (1968) menyangkal pendapat teori H-O yang menyatakan keunggulan comparative sebagai penyebab terjadinya perdagangan inter-regional. Menurut Hilhorst (Hilhors Esther Kembauw, 2008), ada faktor-faktor lain sebagai penyebab perdagangan inter-regional misalnya kelancaran transportasi dan komunikasi muncul dan kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan kemudahan-kemudahan serta adanya jalinan kerjasama antar sesama rekanan usaha. Dengan adanya transportasi dan komunikasi, faktor-faktor produksi yang immobil (tidak bergerak) diantara dua wilayah mulai hilang dan faktor endowment cenderung merata.

Kebijakan alokasi investasi regional menjadi penting bila tujuan pembangunan wilayah yang dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, karena dengan hal itu dapat ditentukan prioritas - prioritas yang akan dilaksanakan (Sjafrizal, 1983). Dalam hal pemerataan, Rahman berpendapat bahwa unsur pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipertimbangkan melalui pelaksanaan switching policy. Bila menurut analisa alokasi anggaran perlu lebih banyak diarahkan pada daerah yang relatif maju, maka setelah mencapai titik tertentu maka prioritas alokasi anggaran harus dibelokkan ke daerah yang kurang maju. Dengan demikian unsur pertumbuhan dan unsur pemerataan akan dapat dipertimbangkan secara sekaligus.

#### 2.1.4 Teori Dualisme Ekonomi

Teori dualisme dikembangkan pertama kali oleh pemikir berkebangsaan Belanda, yaitu J.H. Boeke, yang mencermati pada negara-negara bekas jajahan negaranya, khususnya Indonesia. Ia melihat, bahwa nilai-nilai sosial budaya menjadi unsur yang secara absolut mempengaruhi proses pembangunan. Menurut Boeke, apabila masyarakat terlalu terpaku pada tata sosial budaya yang ada, maka usaha menggerakkan stagnasi ekonomi tidak akan berhasil. Pengamatan Boeke sejauh ini menunjukkan bahwa tata sosial

budaya masyarakat negara berkembang (terutama Indonesia) masih bersifat tidak rasional dan kaku sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan pola/irama perekonomian modern dengan bentuk kelembagaan usaha yang praktis dan dinamis. Kondisi ini tampak terkait dengan dualisme yang berkembang di kalangan masyarakat negara-negara berkembang dalam menggerakkan perekonomiannya.

Dualisme yang dimaksud oleh Boeke adalah menyangkut cara pandang terhadap kesesuaian antara budaya luar dan budaya lokal. Sebagian masyarakat memandang bahwa benturan antara budaya luar (bersumber dari barat) dengan budaya lokal (penduduk asli/pribumi) dianggap tidak bisa berubah (permanen), tidak dapat dihindari dan benturan ini pada akhirnya dianggap yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi oleh masyarakat tradisional setempat.

Teori ini membedakan antara kebutuhan yang bersifat ekonomis dan kebutuhan yang bersifat sosial. Menurut Boeke, pola pemenuhan kebutuhan masyarakat barat didasarkan pada pertimbangan ekonomi rasional (pertimbangan ekonomis). Sebaliknya pemenuhan kebutuhan masyarakat di negara-negara bekas jajahan, didasarkan pada kebutuhan non-ekonomis, yang umumnya adalah untuk mempertahankan gengsi (prestige) di mata masyarakat sosialnya.

Menurut Teori Dualisme Boeke, penawaran (pasok) produk barang tidak responsif terhadap tarikan harga. Bahkan sebaliknya karena pasok barang tersebut tidak bermotif menambah laba (profit motivated) maka kenaikan harga tidak menjadi insentif bagi masyarakat pribumi untuk meningkatkan pasokan. Demikian pula halnya dalam masalah pasokan tenaga kerja. Kurva suplay tenaga kerja bukan lurus ke kanan atas, melainkan akan membalik ke kiri pada titik tertentu sejalan dengan meningkatnya upah atau dikenal sebagai backward banding *supply curve of labor*. Dari sini Boeke menilai, bahwa gejala ini mengindikasikan adanya kelompok pemalas.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa dasar analisis dalam Teori Dualisme Boeke adalah serangkaian dasar tata nilai masyarakat negara berkembang, yang tidak mendukung untuk perbaikan ekonomi. Berdasarkan keyakinannya tentang tata nilai masyarakat negara berkembang, Boeke

berpendapat bahwa yang terbaik adalah membiarkan masyarakat tersebut seperti apa adanya (*just leave it alone*) dan membiarkan mereka untuk berpikir luhur, tetapi tetap miskin (*high thinking and plain living*).

Dualisme regional banyak dibicarakan para ahli sejak tahun 1960-an. Pengertian dualisme regional ini adalah ketidak seimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam suatu negara. Ketidakseimbangan ini sebenarnya terdapat juga di negara-negara maju, tetapi keadaannya tidaklah separah seperti yang terjadi di NSB (Negara Sedang Berkembang). Selain itu, di negara-negara maju ketidakseimbangan itu cenderung bertambah kecil.

Pada tahap awal proses pembangunannya, perbedaan tingkat pembangunan antar daerah semakin buruk dibandingkan pada masa lalu. Ada beberapa daerah yang berkembang sangat pesat sehingga banyak di antaranya mencapai keadaan ekonomi dan sosial yang sudah mendekati negara maju, sedangkan di lain daerah perkembangannya sangat lambat dan bahkan mungkin mengalami kemunduran.

Dualisme regional ini bisa mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan (*gap*) tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah. Selain itu, dualisme regional yang semakin buruk juga bisa menimbulkan masalah-masalah sosial-politik yang dapat menghambat usaha untuk mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi di NSB.

Dualisme regional di NSB dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Dualisme antara daerah perkotaan dan pedesaan.
2. Dualisme antara pusat negara, pusat industri dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dalam negara tersebut. Kedua jenis dualisme tersebut timbul terutamanya sekali sebagai akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dengan daerah pertanian (pedesaan).

Ketidakseimbangan tersebut akhirnya menyebabkan kesenjangan antara pusat negara dengan daerah-daerah lainnya dan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan bertambah besar.

### 2.1.5 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk di suatu negara dalam jangka panjang dan di sertai dengan perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010:58). Keberhasilan suatu wilayah dalam proses pembangunan ialah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar pendapatan, antar daerah dan antar sektor. Pertumbuhan dan pembangunan adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, pembangunan merupakan penentu usaha pembangunan berkelanjutan dan tidak memusnahkan sumberdaya asli. Konsep pembangunan ini dikupas secara mendalam oleh teori pembangunan dan pertumbuhan yang melihat kesesuaian dalam konteks wilayah. Pertumbuhan ekonomi ialah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi pada penduduknya (Kuznet dalam Todaro 2006). Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen (Jhingan, 2000) ialah:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang;
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk;
3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah mengelola sumber daya yang ada bersama masyarakatnya dengan membentuk sebuah kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010:354). Dalam

pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah menggerakkan kegiatan ekonominya dengan kewenangan otonomi daerah untuk bekerjasama dengan masyarakatnya dalam segala aspek kegiatan dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang ada. Dalam kondisi ini ekonomi dalam suatu wilayah dapat di dorong tumbuh dan berkembang, penekanannya pada keseluruhan elemen masyarakat yang berkembang dari tahap ke tahap yang lain.

Pembangunan dalam arti proses merupakan modernisasi yakni pergerakan dari masyarakat peranian tradisional menuju ke arah ekonomi yang berfokus pada rasional, industri, dan jasa. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang linear (*mono-economic approach*) inilah yang menjadi syarat pembangunan untuk mencapai 'status lebih maju'. Rostow membagi proses pembangunan ke dalam lima tahapan yaitu: (1). Masyarakat tradisional (*the traditional society*), (2). Prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*), (3). Tinggal landas (*the take-off*), (4). Menuju kekedewasaan (*the drive to maturity*), dan (5). Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*). Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional.

Pembangunan ekonomi daerah pada teori lokasi juga sering digunakan untuk sebuah penentuan dan pengembangan sebuah industry di suatu daerah. Inti pemikiran dari teori ini adalah sifat dari pengusaha/perusahaan yang berfikir secara rasional mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin. Oleh karena itu pengusaha/perusahaan akan memilih lokasi yang strategis untuk memaksimalkan keuntungannya dan meminimalkan biaya usaha/produksinya dengan memilih lokasi yang dekat dengan bahan baku juga dekat dengan pasar.

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Yaitu proses yang melibatkan sebuah pembentukan instansi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kualitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih

berkualitas, indentifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005:19). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah selalu memiliki perencanaan pembangunan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersinergi mengambil inisiatif dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dan masyarakatnya berpartisipasi menggunakan sumberdaya yang ada kemudian memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Menurut ekonomi klasik, ada 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan juga mobilitas faktor produksi. Artinya sebuah sistem perekonomian akan mencapai sebuah keseimbangan atau titik equilibrium secara alamiah apabila aliran modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Hal ini menyebabkan aliran modal kearah daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah (Arsyad Lincolin, 1997:273).

Menurut Todaro (2008:16), mendefinisikan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan sebuah perubahan yang besar, baik perubahan terhadap struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang. Sadono, Sukirno (1981). Adapun tujuan pembangunan menurut Gant (1971) dalam Sirojuzilam (2010), ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Didalam pembangunan ini terdapat sasaran yang ingin dicapai (Suryana 2000 dalam Lia Maharani, 2008:22) antara lain :

1. Dipenuhinya sandang, pangan dan perumahan serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat yang memerlukan.
2. Dibutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa public, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layak serta komunikasi dan lain – lain. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Terbinanya sarana dan prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa atau pedagang internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabunagn untuk pembiayaan usaha kebutuhan rumah tangga.
4. Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek – proyek.

#### 2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dengan ditandai dengan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat ditinjau dari proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional yang meningkat. Dalam proses pertumbuhan ini selalu mendapat penekanan karena mengandung unsur yang dinamis. Alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya ditinjau dari penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDRB saja, melainkan memberikan nilai yang bersifat immaterial seperti kepuasan, kebahagiaan, kenikmatan, kebahagiaan, dan rasa aman tentram yang dirasakan oleh masyarakat (Arsyad, 2010:143).

Kuznets (1996) dalam Sirojuzilam (2008) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan persediaan barang kepada penduduknya, kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologis yang diperlukan mendorong bertambahnya ketersediaan produk. Sedangkan menurut Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurut Adisasmita Rahardjo (2005) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya.

Gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat ditinjau dari berbagai macam faktor ekonomi yang dapat menunjukkan secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi. Bagi daerah, indikator-indikator tersebut sangat penting untuk keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi haruslah berjalan dengan cara berkesinambungan, beriringan, dan terencana, agar terciptanya sebuah pemerataan kesempatan dan pembagian hasil pembangunan dengan merata. Pertumbuhan merupakan salah satu ukuran utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan hasil dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat dari lapisan atas hingga lapisan masyarakat yang paling bawah, baik terjadi dengan sendirinya maupun terjadi karena adanya campur tangan pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konsumen secara berkala menggambarkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari jenjang tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan dalam proses kegiatan ekonomi, sebaliknya apabila negatif berarti menunjukkan terjadinya penurunan pertumbuhan.

Suatu perekonomian dalam suatu daerah bisa dikatakan mengalami perkembangan atau pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi apabila jumlah barang dan jasa secara fisik

mengalami penambahan besar pada tahun-tahun berikutnya. pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan riil masyarakat secara menyeluruh sebagai gambaran kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang tercipta pada suatu daerah.

Menurut pandangan ekonomi klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow Arsyad (1999:147-148) menyebutkan bahwa teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Perroux (1970) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi dibeberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Adapun factor – factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola

kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, betapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu ( Nur Pratama, 2010) :

a. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 1 tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB maupun PDRB adalah ukuran yang global sifatnya, dan keduanya ini bukan merupakan alat ukur yang sesuai, karena belum dapat mensejahterakan penduduk

yang sesungguhnya, padahal kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap Negara yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Perkapita / Pendapatan perkapita

Produk Domestik Bruto Perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto perkapita pada skala yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah yang lebih baik karena dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara maupun daerah yang bersangkutan dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk Domestik Bruto Perkapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Menurut pandangan semua ekonom baik klasik maupun neoklasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, jumlah penduduk, jumlah stok barang, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985:15). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

## 2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan analisis pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan antar kabupaten, misalnya saja:

Penelitian Denny Iswanto, Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya disparitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, mengklasifikasi daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan

laju pertumbuhan dan pendapatan perkapitanya.. Alat analisis yang dipergunakan adalah analisis pertumbuhan ekonomi, *Location Quotient* (LQ), Shift-share, Tipologi Sektoral, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil, Korelasi Pearson dan menguji berlakunya Hipotesis Kusnetz. Hasil dari penelitian ini adalah Basis Ekonomi Jawa Timur sektor-sektor yang berpotensi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dapat diketahui dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient*, *Shift-Share* dan Tipologi sektoral. Sektor pertanian dan sektor Jasa-jasa merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota pada periode penelitian menggunakan indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa ketimpangan/disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tergolong tinggi dan belum menunjukkan kecenderungan menurun, karena berada diatas ambang batas 0,5 (batas Indeks Williamson). Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah ternyata menunjukkan banyak Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur selama tahun 2008-2012 yang merupakan daerah relatif tertinggal sebanyak 23 Kabupaten/Kota.

Penelitian oleh Warda, tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antara Wilayah Utara Dan Selatan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisa data menggunakan sistem Kuadran (Tipologi Klassen), Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, dan Hipotesis Kuznets. Teknik sampel yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, sampel tersebut dibagi menjadi dua bagian, wilayah utara dan wilayah selatan Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang dipergunakan adalah Tipologi Klassen, indeks Williamson Hipotesis Kuznets. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2001 Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya berada dikuadran I (pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi). Wilayah yang termasuk kategori berpendapatan tinggi, namun pertumbuhannya rendah antara lain Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo dan Kota Mojokerto. Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten

Tuban dan Kota Batu dapat dikategorikan di daerah yang pertumbuhannya tinggi namun berpendapatan rendah. Sedangkan wilayah yang termasuk kategori berpendapatan rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Magetan, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Blitar, Kediri, Ngawi, Jember, Madiun, serta Kota Pasuruan dan Kota Blitar. Berdasarkan Indeks Williamson, Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan ketimpangan pembangunan ekonomi, namun berdasarkan Indeks Entropi Theil Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan ketimpangan pembangunan ekonomi. Berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, Hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian oleh Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo, tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Jawa Timur Tahun 2005-2011). Tujuan dari penelitian ini adalah (untuk mengetahui berapa besar ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga apakah hipotesis Kuznets berlaku di wilayah ini dan bagaimanakah pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2005-2011. Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini indeks wiliamson, hipotesis Kuznets, dan regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini adalah menghasilkan nilai ketimpangan yang tergolong rendah, dikarenakan nilai indeks wiliamson yang mendekati 0. Selain itu, hipotesis Kuznets juga berlaku di Provinsi ini. Dari empat variabel di atas, PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik.

Penelitian Sabda Imani Rubiarko (2013), tentang Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2011. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk melihat seberapa besar ketimpangan yang ada dan melihat hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan oleh penulis adalah indeks

williamson dan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengangguran terbuka secara signifikan dinyatakan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pendapatan di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur memiliki hubungan yang negatif dengan disparitas pendapatan. Dan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan. Sehingga terbukti secara signifikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, angka partisipasi kasar dan aglomerasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi disparitas pendapatan.

Penelitian Ananda Willi Wulandari (2016), Tentang Analisis Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Jember Tahun 2008 - 2013. Dalam penelitian ini memiliki tujuan (1). Untuk melihat seberapa besar ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2008 – 2013, (2). Untuk mengetahui pola pertumbuhan dan hubungannya dengan tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2008 – 2013. Alat analisis yang dipergunakan analisis Tipologi Klassen, analisis indeks Williamson, dan indeks kesenjangan Bonit. Hasil penelitian ini adalah analisis indeks williamson mempunyai nilai ketimpangan rata – rata sebesar 0,6600 dan hasil dari indeks kesenjangan bonit adalah (1). Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari merupakan wilayah yang mempunyai angka kesenjangan tinggi dan tertinggi di Kabupaten Jember, (2). Kecamatan Silo, Rambipuji, Ledokombo merupakan tiga kecamatan di Kabupaten Jember yang mempunyai ketmpangan pendapatan antar wilayah yang paling kecil, (3). Secara keseluruhan terjadi peningkatan kesenjangan antar wilayah. Artinya diduga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember membuat kesenjangan antar wilayah semakin meningkat.

Penelitian Eko sulistiono (2013), tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk melihat seberapa besar ketimpangan yang ada dan melihat hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan oleh penulis adalah Tipologi Klasen, indeks williamson dan indeks Entropi Theil. Hasil dari penelitian ini

Berdasarkan analisis Tipologi Klasen wilayah yang termasuk maju dan tumbuh cepat masing masing Kab. Gresik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya. Wilayah yang sedang tumbuh yaitu Kab. Tulungagung, Kab Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Belitar, Kota Pasuruan, Kota Madiun dan Kota Batu. Wilayah yang termasuk maju tetapi tertekan yaitu Kab. Sidoarjo dan Kota Kediri. Kemudian wilayah yang termasuk relatif tertinggal terdapat 19 Kabupaten. Pada periode 2004-2008 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan menurut indeks Williamson maupun indeks entropi Theil.

Penelitian Budiantoro Hartono (2008) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan regional berdasarkan Indeks Williamson ( $V_w$ ) dan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan regional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981 – 2005, menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981-2005, menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat ketimpangan, ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 1981-2005, menganalisis pengaruh alokasi dana bantuan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981-2005. Alat analisis yang digunakan oleh penulis adalah indeks williamson dan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan menggunakan indeks Williamson selama periode 1981-2005 menunjukkan ketimpangan semakin melebar. Nilai  $R^2$  sebesar 0,937 artinya variasi variabel ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan daerah sebesar 93,7% sedangkan sisanya sebesar 6,3% dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.

Penelitian oleh Lili Masli (2006), tentang Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional antar

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, (2). Melihat pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa barat, (3). Melihat seberapa besar ketimpangan regional kabupaten dan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat,(4). Untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan ketimpangan regional antar kabupaten/ kota di provinsi Jawa Barat. Alat analisis yang dipergunakan adalah Tipologi Klassen, indeks Williamson dan Entropi Theil. Hasil dari penelitian ini adalah (1). Menurut analisis Tipology kelas termasuk klasifikasi daerah relative tertinggal, penyebabnya adalah terjadinya aliran investasi dari daerah relatif miskin ke daerah relative kaya. (2). Dengan menggunakan PDRB tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode penelitian antara tahun 1993 – 2006 cenderung meningkat berdasarkan indeks Williamson dan indeks Entropi Theil. Penyebabnya adalah adanya perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang negative baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional.

Penelitian oleh Denis Jakson Bimbin (2013), tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 2001-2011. Alat analisis yang digunakan adalah analisis ketimpangan Williamson, analisis ketimpangan entropi Theil, analisis Tipologi Klassen dan analisis Konvergensi. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Secara keseluruhan bahwa ketimpangan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil hasilnya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami ketimpangan, (2) Berdasarkan Tipologi Daerah terdapat daerah yang relatif cepat maju dan cepat tumbuh terdiri dari 5 kabupaten/kota, daerah yang relatif maju tapi tertekan terdiri dari 3 kabupaten, daerah yang relatif berkembang cepat terdiri dari 1 kabupaten, dan daerah yang relatif tertinggal terdiri dari 15 kabupaten. (3) Dari Analisis Konvergensi menunjukkan tidak terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan yang berarti

kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih lambat dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya dengan demikian perekonomian daerah miskin lambat mengejar ketertinggalannya dan ketimpangan perekonomian antar daerah cenderung akan meningkat.

Penelitian oleh Devi Nurita Noviana (2014), Tentang Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menghitung tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota, 2) mengetahui sektor potensial dan 3) membuktikan berlaku atau tidaknya kurva kuznet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar daerah, analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share untuk mengetahui sektor-sektor potensial yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan analisis Typology Klassen untuk mengelompokkan tiap-tiap wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dan mengelompokkan sektorsektor dalam klasifikasi 4 kuadran. Hasil Penelitian menunjukkan Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tinggi ( $>0,5$ ) yaitu dengan analisis Indeks Williamson sebesar 0,71 dan analisis Indeks Entropi Theil sebesar 4,35. Sementara, hipotesis kurva “U” terbalik Kuznets yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dengan Indeks ketimpangan belum berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Denny Iswanto (2015)	Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Pertumbuhan Ekonomi,</li> <li>• Location Quotient(LQ),</li> </ul>	Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota pada periode penelitian menggunakan indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa ketimpangan/disparitas

		Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shift-share,</li> <li>• Tipologi Sektoral,</li> <li>• Tipologi Klassen,</li> <li>• Indeks Williamso,</li> <li>• Indeks Theil,</li> <li>• Korelasi Pearson,</li> <li>• Hipotesis Kusnetz</li> </ul>	pendapatan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tergolong tinggi dan belum menunjukkan kecenderungan menurun, karena berada diatas ambang batas 0,5 (batas Indeks Williamson). Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah ternyata menunjukkan banyak Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur selama tahun 2008-2012 yang merupakan daerah relatif tertinggal sebanyak 23 Kabupaten/Kota.
2	Warda (2013)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antara Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuadran (Tipologi Klassen),</li> <li>• Indeks Williamson ,</li> <li>• Indeks Entropi Theil,</li> <li>• Hipotesis Kuznets</li> </ul>	Pada tahun 2011 Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya berada dikuadran I (pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi). Sisanya termasuk pada golongan Wilayah yang kategori berpendapatan tinggi, namun pertumbuhannya rendah. Berdasarkan Indeks Williamson, Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan ketimpangan pembangunan ekonomi, namun berdasarkan Indeks Entropi Theil Provinsi Jawa Timur mengalami

				<p>penurunan ketimpangan pembangunan ekonomi. Berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, Hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jawa Timur.</p>
3	<p>Rama Nurhud a, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo (2013)</p>	<p>Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Jawa Timur Tahun 2005-2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks wiliamson,</li> <li>• hipotesis Kuznets,</li> <li>• regresi berganda</li> </ul>	<p>Nilai ketimpangan yang tergolong rendah, dikarenakan nilai indeks wiliamson yang mendekati 0. Selain itu, hipotesis Kuznets juga berlaku di Provinsi ini. Dari empat variabel di atas, PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak diketahui pengaruhnya dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik.</p>
4	<p>Sabda Imani Rubiarko (2013)</p>	<p>Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 –</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks williamson,</li> <li>• metode regresi linier berganda</li> </ul>	<p>Pengangguran terbuka secara signifikan dinyatakan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pendapatan di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur memiliki hubungan yang negatif dengan disparitas pendapatan. Dan</p>

		2011		<p>peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan. Sehingga terbukti secara signifikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, angka partisipasi kasar dan aglomerasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi disparitas pendapatan.</p>
5	Ananda Willi Wulandari (2016)	<p>Analisis Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Jember Tahun 2008 - 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologi Klassen,</li> <li>• Analisis indeks Willimson,</li> <li>• Indeks kesenjangan Bonit</li> </ul>	<p>Analisis indeks williamson mempunyai nilai ketimpangan rata – rata sebesar 0,6600 dan hasil dari indeks kesenjangan bonit adalah : (1). Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Summersari merupakan wilayah yang mempunyai angka kesenjangan tinggi dan tertinggi di Kabupaten Jember, (2). Kecamatan Silo, Rambipuji, Ledokombo merupakan tiga kecamatan di Kabupaten Jember yang mempunyai ketmpangan pendapatan antar wilayah yang paling kecil, (3). Secara</p>

				keseluruhan terjadi peningkatan kesenjangan antar wilayah. Artinya diduga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember membuat kesenjangan antar wilayah semakin meningkat.
6	Eko sulistiono (2013)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologi Klasen</li> <li>• Indeks Williamson</li> <li>• Indeks Entropi Theil</li> </ul>	Berdasarkan analisis Tipologi Klasen wilayah yang termasuk maju dan tumbuh cepat masing masing Kab. Gersik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya. Wilayah yang sedang tumbuh yaitu Kab. Tulungagung, Kab Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Belitar, Kota Pasuruan, Kota Madiun dan Kota Batu. Wilayah yang termasuk maju tetapi tertekan yaitu Kab. Sidoarjo dan Kota Kediri. Kemudian wilayah yang termasuk relatif tertinggal terdapat 19 Kabupaten. Pada periode 2004-2008 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan menurut indeks

				Williamson maupun indeks entropi Theil.
7	Budiantoro Hartono (2008)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks williamson,</li> <li>• metode regresi linier berganda</li> </ul>	Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan menggunakan indeks Williamson selama periode 1981-2005 menunjukkan ketimpangan semakin melebar. Nilai R <sup>2</sup> sebesar 0,937 artinya variasi variabel ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel investasi swasta perkapita, rasio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan daerah sebesar 93,7% sedangkan sisanya sebesar 6,3% dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.
8	Lili Masli (2006)	Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologi Klassen</li> <li>• Indeks Williamson</li> <li>• Indeks Enthropi Theil</li> </ul>	Dengan menggunakan PDRB tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode penelitian antara tahun 1993 – 2006 cenderung meningkat berdasarkan indeks Williamson dan indeks Enthropi Theil. Penyebabnya

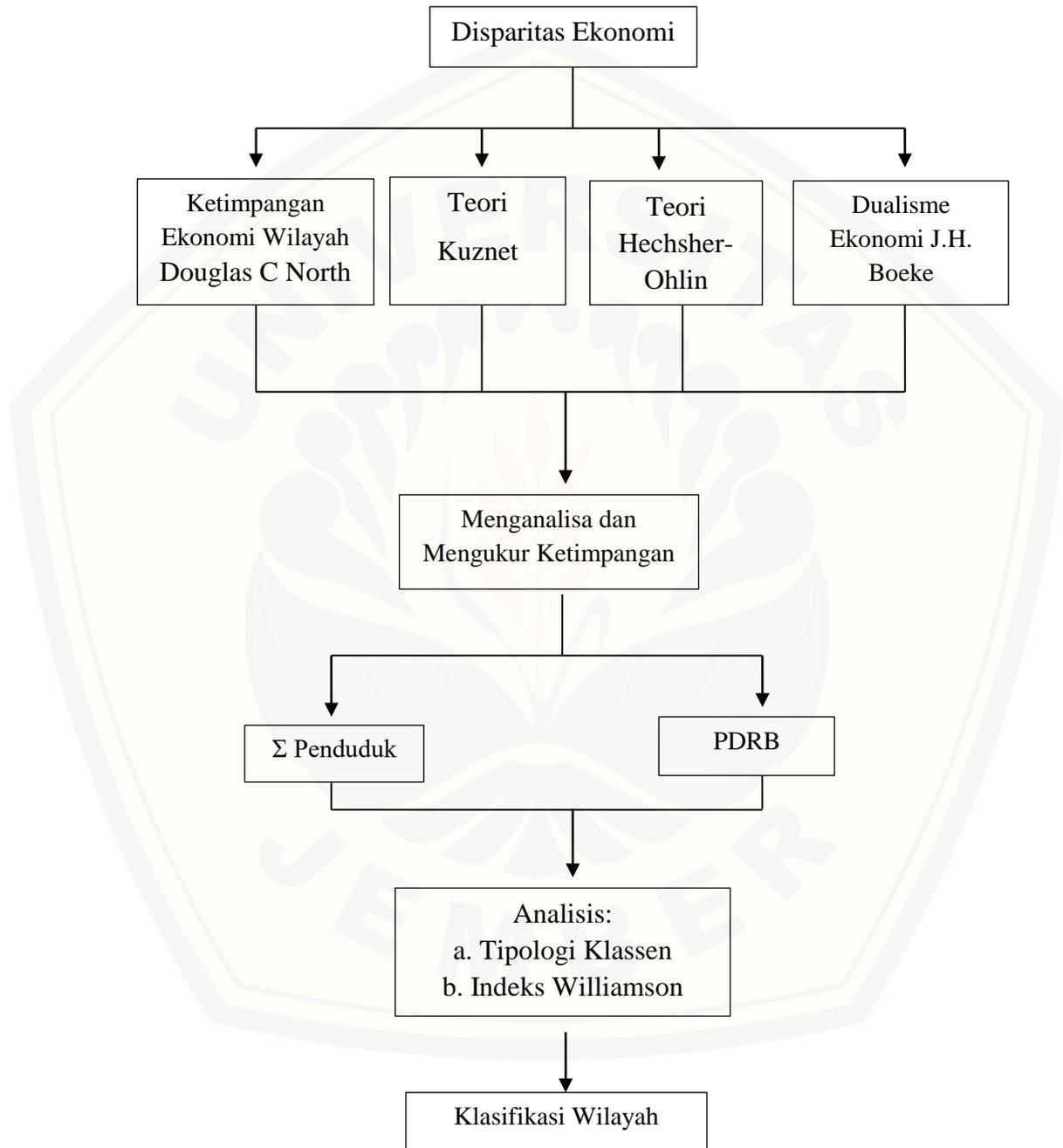
		Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat		adalah adanya perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang negative baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional.
9	Denis Jakson Bimbin (2013)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ketimpangan Williamson</li> <li>• Analisis Entropi Theil</li> <li>• Tipologi Klassen</li> <li>• Analisis Konvergensi</li> </ul>	(1) Secara keseluruhan bahwa ketimpangan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil hasilnya menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami ketimpangan, (2) Berdasarkan Tipologi Daerah terdapat daerah yang relatif cepat maju dan cepat tumbuh terdiri dari 5 kabupaten/kota, daerah yang relatif maju tapi tertekan terdiri dari 3 kabupaten, daerah yang relatif berkembang cepat terdiri dari 1 kabupaten, dan daerah yang relatif tertinggal terdiri dari 15 kabupaten. (3) Dari Analisis Konvergensi menunjukkan tidak terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan yang berarti kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih lambat

				dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya dengan demikian perekonomian daerah miskin lambat mengejar ketertinggalannya dan ketimpangan perekonomian antar daerah cenderung akan meningkat.
10	Devi Nurita Noviana (2014)	Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Williamson</li> <li>• Indeks Entropi</li> <li>• Entropi Theil</li> <li>• Location Qoutient (LQ) dan Shift Share</li> <li>• Typology Klassen</li> </ul>	Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tinggi ( $>0,5$ ) yaitu dengan analisis Indeks Williamson sebesar 0,71 dan analisis Indeks Entropi Theil sebesar 4,35. Sementara, hipotesis kurva “U” terbalik Kuznets yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dengan Indeks ketimpangan belum berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Sumber : Diolah dari berbagai sumber)

### 2.3 Kerangka Konseptual

Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Pembangunan yang dijalankan diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berimplikasi pada pencapaian target sektoral, keberhasilannya dapat diketahui dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan perekonomian yang positif dan apabila mengalami penurunan maka terjadinya kegiatan perekonomian yang menurun (negatif). Perkembangan pembangunan suatu daerah mengalami perubahan dipengaruhi adanya pertumbuhan perekonomian. Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun sehingga dapat menjadi pusat kegiatan baik sosial maupun ekonomi regional yang sangat prospektif juga potensial. Maka dengan bertambahnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur maka akan semakin mengurangi tingkat ketimpangan regional maupun pendapatan di daerah – daerah terbelakang.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Rancangan Penelitian**

#### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian tentang analisis tingkat ketimpangan antar kabupaten di provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami karakteristik obyek penelitian dalam berbagai aspek secara sistematis (Sekaran, 2006:160).

#### **3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan memilih daerah yang meliputi Provinsi Jawa Timur sebagai studi kasus. Dikarenakan di Provinsi Jawa Timur masih terdapat terjadi banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Pada dasarnya masih banyak Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ini termasuk pada kategori daerah-daerah yang terbelakang yang masih kurang merata pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu sangat diperlukannya analisis pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan antar daerah agar dapat diketahui seberapa besar tingkat ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi dan daerah mana saja yang mengalami tingkat ketimpangan paling tinggi maupun rendah.

#### **3.1.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data time series (kurun waktu). Data yang dikumpulkan berupa data produk domestik regional bruto (PDRB) tiap Kabupaten/Kota dan PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur serta data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini.

### 3.2 Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa metode analisis data, yaitu:

#### 3.2.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tipology Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah pada Provinsi Jawa Timur. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor – sektor perekonomian wilayah Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan sektor – sektor perekonomian Provinsi Jawa Timur sebagai daerah referensi. Analisis Tipologi Klassen menghasilkan empat klasifikasi sektor yaitu : (1). Wilayah maju dan tumbuh pesat (*Developed Sector*), (2). Wilayah Maju tapi Tertekan (*Stagnant Sector*), (3). Wilayah yang Terbelakang (*Undeveloped Sector*) dan (4). Wilayah Berkembang (*Developing Sector*). Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rendah dibandingkan dengan rata – rata daerah di wilayah referensi.

Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita tinggi dibandingkan rata-rata daerah wilayah referensi masuk kedalam wilayah maju dan tumbuh cepat. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dibandingkan rata-rata referensi daerah tetapi pendapatan perkapitanya lebih rendah dari rata-rata wilayah referensi masuk kedalam wilayah yang sedang tumbuh. Daerah yang masuk kedalam wilayah maju tapi tertekan adalah daerah yang mempunyai pendapatan perkapita tinggi dibandingkan rata-rata wilayah referensi tetapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan wilayah referensi. Sedangkan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rendah dibandingkan rata-rata daerah di wilayah referensi masuk kedalam wilayah relative tertinggal. Klasifikasi wilayah menurut tipologi klasen untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klasen

$r$ \ $y$	$y_i > y$	$Y_i < y$
$r_i > r$	Kuadran I Wilayah Maju dan Tumbuh Cepat	Kuadran II Wilayah yang Sedang Tumbuh
$r_i < r$	Kuadran III Wilayah Maju tetapi Tertekan	Kuadran IV Wilayah Relatif Tertinggal

(Sumber: Lili Masli, 2006)

Keterangan:

$r_i$  = Laju pertumbuhan ekonomi PDRB wilayah  $i$

$y_i$  = PDRB perkapita wilayah  $i$

$r$  = Laju pertumbuhan PDRB wilayah referensi

$y$  = PDRB perkapita wilayah referensi

### 3.2.2 Analisis Ketimpangan Regional

Untuk melihat ketimpangan regional digunakan rumus indeks dari Jeffery G. Williamson (Upall dan Sri Handoko, 1986):

$$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot P_j / P}}{Y}$$

Keterangan:

IW = Indeks Ketimpangan Wiliamson

$Y_j$  = PDRB perkapita kabupaten/kota  $j$

$Y$  = Jumlah PDRB perkapita provinsi Jawa Timur

$P_j$  = Jumlah penduduk kabupaten/kota  $j$  di provinsi Jawa Timur

$P$  = Jumlah penduduk di provinsi Jawa Timur

Indeks Wiliamson (VW) yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika VW mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. Jika IW mendekati 1

maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini adalah semua variabel yang terkait dalam rumus hipotesis. Untuk menghindari salah persepsi dan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan di analisis, maka akan diberikan batasan terhadap variabel-variabel berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap daerah dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010.
2. Jumlah penduduk yang dimaksud adalah keseluruhan penduduk yang tinggal dan menetap di Provinsi Jawa Timur yang tersebar dalam 38 Kabupaten/Kota selama tahun 2012-2016 dalam satuan ribu.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Tipologi Klasen, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi menjadi empat kelompok yaitu wilayah maju dan tumbuh cepat yaitu Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu. Kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi wilayah yang sedang tumbuh, masing-masing Kab. Banyuwangi, Kab. Lamongan dan Kab. Sumenep. Kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi wilayah maju tapi tertekan ada dua yaitu Kota Kediri dan Kota Malang. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam klasifikasi wilayah yang relatif tertinggal yaitu Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Tuban, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto.
2. Tingkat ketimpangan tahun 2012-2016 di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis indeks Williamson rata-rata ketimpangan sebesar 0.954322122. Nilai tersebut menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2016, hal ini diakibatkan oleh tidak terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah dan pengelolaan otonomi daerah yang kurang maksimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasam di atas, penulis menyarankan beberapa hal untuk pihak-pihak terkait:

1. Konsolidasi antar daerah perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir. Untuk daerah relative tertinggal berdasarkan analisis Tipologi Klassen, diperlukan kebijakan atau campur tangan pemerintah antar lain dengan mengadakan peningkatan, perluasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan daerah-daerah yang relatif tertinggal dengan sasaran menyerasikan pertumbuhan antar daerah.
2. Perlunya bantuan pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing sehingga diharapkan daerah yang tertinggal mampu mengejar daerah yang sudah maju. Agar penggunaan dana bantuan pembangunan optimal, perlu ditingkatkan peran pengawasan baik oleh institusi yang berwenang maupun masyarakat.
3. Dalam menurunkan Disparitas antar Wilayah diperlukan kebijakan Pemerintah untuk pemberlakuan otonomi daerah dengan mempertimbangkan dalam hal pendapatan daerah dan pendapatan provinsi agar daerah yang tertinggal tidak semakin tertinggal. Kemudian, perlu adanya program yang memadai dalam menjalankan kebijakan seperti prioritas pembangunan daerah terutama dalam sarana dan prasarana ekonomi untuk Kabupaten/Kota yang tertinggal agar dapat mengurangi tingkat ketimpangan karena ditinjau dari indeks ketimpangan secara umum telah menunjukkan kecenderungan arah peningkatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, H.R. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ananda Willi Wulandari. 2016. Analisis Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Jember Tahun 2008 – 2013. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*. Yogyakarta: Badan Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad, 2014. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- BPS. 2017, *Produk Domestik Regional Bruto Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016*. Jember Kantor Statistik.
- Budiantoro Hartono. 2008. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Denis Jakson Bimbin. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Denny Iswanto. 2015. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. Yayasan Al-Kahfi Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Signifikan Vol. 4 No. 1 April 2015*.
- Devi Nurita Noviana. 2014. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Eko Sulistiono. 2011. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Emil Salim. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

- Ernan R. 2018. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Penerbit: Yayasan Obor Pustaka.
- Esther Kembauw. 2008. *Pembangunan Perekonomian Maluku*. Penerbit: Pendidikan Deepublish.
- Gemmel, Norman, Nirwono. 1992. *Ilmu Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Glasson, John. 1997. *Pengantar Perencanaan Regional*. Diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jember University Press. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember Edisi Ketiga*. Jember: Jember University Press.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jhingan, M., L. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Lili, M. 2006. *Dalam Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat* oleh Lili Masli.
- Muammil, Abdurrahman. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media.
- Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rama Nurhuda, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, Nomor 4, Hal. 110-119.
- Rahardjo Adisasmita. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu.
- Rostow & Musgrave. 1996. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Sadono, S., 1981. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Bina Grafika. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media, Cetakan Pertama.

- Sumarmi. 2012. *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan*. Aditya Media Publising, Cetakan Pertama.
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. 1996. *Ekonomi Pembangunan: proses, masalah, dasar kebijakan*. Jakarta: LP3ES.
- Suryana. 2000. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Taryono. *Modul 1 Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan*. UNITIRTA. 2014.
- Tulus T.H. Tambunan. 2004. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- T. Tarmidi, Lepi. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Thee Kian Wie, 1982, *Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga, Edisi Keenam.
- Todaro, M. 2006. *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Warda. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antara Wilayah Utara Dan Selatan Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya.

**LAMPIRAN**

Lampiran A Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2016 (Km2)

Kabupaten/Kota	Luas (km2)
	2016
Jawa Timur	47799.75
Kabupaten Pacitan	1389.92
Kabupaten Ponorogo	1305.7
Kabupaten Trenggalek	1147.22
Kabupaten Tulungagung	1055.65
Kabupaten Blitar	1336.48
Kabupaten Kediri	1386.05
Kabupaten Malang	3530.65
Kabupaten Lumajang	1790.9
Kabupaten Jember	3092.34
Kabupaten Banyuwangi	5782.4
Kabupaten Bondowoso	1525.97
Kabupaten Situbondo	1669.87
Kabupaten Probolinggo	1696.21
Kabupaten Pasuruan	1474.02
Kabupaten Sidoarjo	634.38
Kabupaten Mojokerto	717.83
Kabupaten Jombang	1115.09
Kabupaten Nganjuk	1224.25
Kabupaten Madiun	1037.58
Kabupaten Madiun	688.84
Kabupaten Ngawi	1295.98
Kabupaten Bojonegoro	2198.79
Kabupaten Tuban	1834.15
Kabupaten Lamongan	1782.05
Kabupaten Gresik	1191.25
Kabupaten Bangkalan	1001.44
Kabupaten Sampang	1233.08
Kabupaten Pamekasan	792.24
Kabupaten Sumenep	1998.54
Kota Kediri	63.4
Kota Blitar	32.57
Kota Malang	145.28
Kota Probolinggo	56.67
Kota Pasuruan	35.29
Kota Mojokerto	16.47
Kota Madiun	33.92
Kota Surabaya	350.54
Kota Batu	136.74

Lampiran B Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2012-2016 (Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk (ribu)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kabupaten</b>						
1	Pacitan	545905	547917	549481	550986	552307
2	Ponorogo	861806	863890	865809	867393	868814
3	Trenggalek	681706	683791	686781	689200	691295
4	Tulungagung	1004711	1009411	1015974	1021190	1026101
5	Blitar	1130423	1136701	1140793	1145396	1149710
6	Kediri	1521895	1530504	1538929	1546883	1554385
7	Malang	2490878	2508698	2527087	2544315	2560675
8	Lumajang	1017900	1023818	1026378	1030193	1033698
9	Jember	2367482	2381400	2394608	2407115	2419000
10	Banyuwangi	1574528	1582586	1588082	1594083	1599811
11	Bondowoso	748127	752791	756989	761205	765094
12	Situbondo	657874	660702	666013	669713	673282
13	Probolinggo	1116390	1123204	1132690	1140480	1148012
14	Pasuruan	1543723	1556711	1569507	1581787	1593683
15	Sidoarjo	2016974	2048986	2083924	2117279	2150482
16	Mojokerto	1049886	1057808	1070486	1080389	1090075
17	Jombang	1220404	1230881	1234501	1240985	1247303
18	Nganjuk	1028914	1033597	1037723	1041716	1045375
19	Madiun	669088	671883	673988	676087	677993
20	Magetan	624373	625703	626614	627413	627984
21	Ngawi	822605	824587	827829	828783	829480
22	Bojonegoro	1223079	1227704	1232386	1236607	1240383
23	Tuban	1134584	1141497	1147097	1152915	1158374
24	Lamongan	1184581	1186382	1187084	1187795	1188193
25	Gresik	1211686	1227101	1241613	1256313	1270702
26	Bangkalan	928024	937497	945821	954305	962773
27	Sampang	903613	913499	925911	936801	947614
28	Pamekasan	817690	827407	836224	845314	854194
29	Sumenep	1056415	1061211	1067202	1072113	1076805
<b>Kota</b>						
30	Kediri	273695	276619	278072	280004	281978
31	Blitar	134723	135702	136903	137908	139117
32	Malang	834527	840803	845973	851298	856410
33	Probolinggo	222292	223881	226777	229013	231112
34	Pasuruan	190191	192285	193329	194815	196202
35	Mojokerto	122594	123806	124719	125706	126404
36	Madiun	172886	174114	174373	174995	175607
37	Surabaya	2805718	2821929	2833924	2848583	2862406
38	Batu	194700	196189	198608	200485	202319
<b>Jawa Timur</b>		<b>38106590</b>	<b>38363195</b>	<b>38610202</b>	<b>38847561</b>	<b>39075152</b>

Lampiran C PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)

No	Kab/Kota dg Total 38 Kab/Kota	PDRB ADHK 2010 (Milyar Rupiah)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pacitan	7705	8157.6	8582.2	9019.5	9489.1	8590.68
2	Ponorogo	10038.4	10554.5	11104.5	11687.9	12305.7	11138.2
3	Trenggalek	8959.5	9496.7	9998.5	10501.6	11026.5	9996.56
4	Tulungagung	18999	20164.3	21265.2	22326.6	23446.4	21240.3
5	Blitar	18054.5	18967.3	19920.2	20925.5	21991.4	19971.78
6	Kediri	20538.3	21733.5	22890	24007.7	25211.9	22876.28
7	Malang	47076	49571.7	52550.4	55317.8	58247.3	52552.64
8	Lumajang	16053.4	16949.6	17851.9	18676.9	19555.2	17817.4
9	Jember	37262	39519.2	41971.7	44222.6	46526.6	41900.42
10	Banyuwangi	37235.7	39733.6	42005.7	44529.9	46924.6	42085.9
11	Bondowoso	9583.4	10140.1	10652.4	11179.6	11735.6	10658.22
12	Situbondo	9411.6	9993.8	10572.4	11086.5	11640.8	10541.02
13	Probolinggo	16936.8	17808.9	18682.2	19571	20504.1	18700.6
14	Pasuruan	70167.1	75044	80105.4	84415.7	89011.2	79748.68
15	Sidoarjo	93543.9	99992.5	106434	112013	118179	106032.5
16	Mojokerto	39047.3	41608.4	44292	46792.3	49321.9	44212.38
17	Jombang	19514.8	20672.3	21793.2	22960.2	24199.1	21827.92
18	Nganjuk	12767	13456	14142.9	14875.4	15661.8	14180.62
19	Madiun	9135.7	9654.1	10169.7	10704.9	11268.9	10186.66
20	Magetan	9251.2	9792.6	10291.7	10823.9	11398.1	10311.5
21	Ngawi	9568.2	10094	10681	11223.1	11807.6	10674.78
22	Bojonegoro	38136.1	39039.4	39934.8	46892.8	57187.4	44238.1
23	Tuban	31816.3	33678.8	35519.9	37256	39081.8	35470.56
24	Lamongan	18562.7	19848.8	21099.9	22316.9	23623.8	21090.42
25	Gresik	67248.8	71314.2	76336	81360.4	85835.1	76418.9
26	Bangkalan	16173.7	16204	17369.2	16906.8	17018.6	16734.46
27	Sampang	10910.9	11623.8	11632.9	11874.5	12606.8	11729.78
28	Pamekasan	7894	8375.2	8846.2	9316.9	9815.8	8849.62
29	Sumenep	17665	20218.1	21476.9	21750.6	22311.7	20684.46
30	Kota Kediri	63185.1	65408.8	69232.9	72945.5	76959.4	69546.34
31	Kota Blitar	3236.6	3446.8	3649.6	3856.9	4079.3	3653.84
32	Kota Malang	35355.7	37547.7	39724.7	41952.1	44303.9	39776.82
33	Kota Probolinggo	5552.1	5911.3	6261.9	6628.8	7018.3	6274.48
34	Kota Pasuruan	4051.2	4315.1	4561.3	4813.3	5076.4	4563.46
35	Kota Mojokerto	3358.4	3566.7	3774.6	3991.4	4221.5	3782.52
36	Kota Madiun	6937.7	7470.7	7965.3	8455.4	8954.7	7956.76
37	Kota Surabaya	265892	286051	305948	324215	343653	305151.8
38	Kota Batu	7473.6	8018.6	8572.1	9145.9	9750.9	8592.22
	Total 38 Kab/Kota	1124299	1195144	1267863	1340541	1420951	1269760
	Jawa Timur	1124465	1192790	1262685	1331395	1405236	1263314

Lampiran D Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota 2012-2016 (%)

No	Kab/Kota dg Total 38 Kab/Kota	Laju Pertumbuhan					
		2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Pacitan	6.331594	5.874108	5.204962	5.09543	5.206497	5.542518
2	Ponorogo	5.977492	5.141258	5.211047	5.253726	5.285808	5.373866
3	Trenggalek	6.21562	5.99587	5.283941	5.031755	4.998286	5.505094
4	Tulungagung	6.465604	6.133481	5.459649	4.991253	5.015542	5.613106
5	Blitar	5.619548	5.055803	5.02391	5.046636	5.093785	5.167936
6	Kediri	6.114214	5.819372	5.321278	4.882918	5.015891	5.430735
7	Malang	6.769363	5.301427	6.008872	5.266183	5.295764	5.728322
8	Lumajang	6.002219	5.582618	5.323429	4.621357	4.702601	5.246445
9	Jember	5.8333	6.057646	6.205844	5.362899	5.210006	5.733939
10	Banyuwangi	7.244444	6.708347	5.718334	6.009184	5.377735	6.211609
11	Bondowoso	6.093214	5.809003	5.052218	4.949119	4.973344	5.37538
12	Situbondo	5.427294	6.185983	5.78959	4.862661	4.999775	5.453061
13	Probolinggo	6.437078	5.149143	4.903728	4.75747	4.767769	5.203037
14	Pasuruan	7.500199	6.950408	6.744577	5.380786	5.443893	6.403972
15	Sidoarjo	7.259862	6.893662	6.442283	5.241355	5.504991	6.268431
16	Mojokerto	7.255712	6.558968	6.449659	5.645037	5.406018	6.263079
17	Jombang	6.145227	5.931396	5.422232	5.354881	5.395859	5.649919
18	Nganjuk	5.851822	5.396726	5.104786	5.179277	5.286581	5.363838
19	Madiun	6.121714	5.674442	5.340736	5.262692	5.268615	5.53364
20	Magetan	5.79087	5.852214	5.096706	5.171157	5.304927	5.443175
21	Ngawi	6.629668	5.495286	5.815336	5.075367	5.208008	5.644733
22	Bojonegoro	3.768877	2.368622	2.29358	17.4234	21.95348	9.561591
23	Tuban	6.287102	5.853918	5.466644	4.887683	4.900687	5.479207
24	Lamongan	6.924916	6.92841	6.303152	5.7678	5.8561	6.356076
25	Gresik	6.916041	6.045312	7.041795	6.581953	5.49985	6.41699
26	Bangkalan	-1.41895	0.187341	7.190817	-2.66218	0.661272	0.791659
27	Sampang	5.773947	6.533833	0.078288	2.076868	6.166997	4.125987
28	Pamekasan	6.253533	6.095769	5.623746	5.320929	5.354785	5.729753
29	Sumenep	9.960908	14.45287	6.226104	1.274392	2.579699	6.898795
30	Kota Kediri	5.273233	3.519342	5.846461	5.362479	5.502601	5.100824
31	Kota Blitar	6.52317	6.49447	5.883718	5.680075	5.766289	6.069544
32	Kota Malang	6.257194	6.199849	5.797958	5.607091	5.605917	5.893602
33	Kota Probolinggo	6.486507	6.469624	5.931013	5.859244	5.875875	6.124453
34	Kota Pasuruan	6.311176	6.514119	5.705546	5.524741	5.466104	5.904337
35	Kota Mojokerto	6.090473	6.202358	5.828917	5.743655	5.764895	5.92606
36	Kota Madiun	6.825881	7.682661	6.620531	6.152938	5.905102	6.637423
37	Kota Surabaya	7.350216	7.581496	6.955725	5.970826	5.995216	6.770696
38	Kota Batu	7.256028	7.292336	6.902701	6.693809	6.614986	6.951972
	Total 38 Kab/Kota	6.570748	6.301234	6.084608	5.732298	5.99831	6.13744
	Jawa Timur	6.644791	6.076243	5.859767	5.441621	5.546145	5.913713

Lampiran E PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah)

No	Kab/Kota dg Total 38 Kab/Kota	PDRB Perkapita ADHK 2010 (Ribu Rupiah)					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pacitan	14114.3	14888.8	15618.2	16369.4	17181	15634.34
2	Ponorogo	11648.2	12217.2	12825.8	13474.6	14164	12865.96
3	Trenggalek	13142.8	13888.2	14558.1	15237.3	15950.5	14555.38
4	Tulungagung	18910.2	19976.5	20930.3	21863.1	22850.1	20906.04
5	Blitar	15971.7	16686.3	17461.6	18269.1	19128	17503.34
6	Kediri	13495.2	14200.2	14874.2	15519.9	16219.7	14861.84
7	Malang	18899.2	19759.9	20794.8	21741.9	22746.6	20788.48
8	Lumajang	15771.1	16555.6	17392.7	18129.4	18917.6	17353.28
9	Jember	15738.9	16595	17527.6	18371.7	19233.8	17493.4
10	Banyuwangi	23649.2	25106.5	26450.3	27934.2	29331.5	26494.34
11	Bondowoso	12810.3	13469.9	14071.9	14686.8	15338.6	14075.5
12	Situbondo	14305.5	15126.1	15874.4	16554.4	17289.1	15829.9
13	Probolinggo	15170.9	15855.5	16493.5	17160	17860.7	16508.12
14	Pasuruan	45453.8	48207.1	51038.8	53366.9	55851.9	50783.7
15	Sidoarjo	46377.7	48800.6	51074.6	52903.6	54954.3	50822.16
16	Mojokerto	37191.5	39334.9	41375.1	43310.2	45245.3	41291.4
17	Jombang	15990.5	16794.5	17653.5	18501.4	19401.2	17668.22
18	Nganjuk	12408.4	13018.6	13629.1	14279.9	14981.6	13663.52
19	Madiun	13653.7	14368.4	15088.6	15833.3	16620.8	15112.96
20	Magetan	14816.2	15650.7	16424.6	17252	18149.9	16458.68
21	Ngawi	11631.7	12241.1	12902.8	13541.4	14234.6	12910.32
22	Bojonegoro	31179.9	31798.8	32404.1	37920.8	46104	35881.52
23	Tuban	28041.8	29504	30965	32315.1	33737.7	30912.72
24	Lamongan	15670	16730.3	17774.4	18788.4	19882	17769.02
25	Gresik	55499.5	58116	61482	64762	67549.5	61481.8
26	Bangkalan	17428.5	17284.3	18364.6	17716.5	17676.2	17694.02
27	Sampang	12075	12724.5	12563.9	12675.6	13303.9	12668.58
28	Pamekasan	9653.9	10122.3	10579	11022	11491.2	10573.68
29	Sumenep	16721.9	19052.1	20124.6	20287.8	20720.4	19381.36
30	Kota Kediri	230855.2	236474.3	248949.6	260519.7	272905.7	249940.9
31	Kota Blitar	24028.3	25400.4	26659.2	27968.9	29326.1	26676.58
32	Kota Malang	42367.6	44657.2	46955.9	49280.1	51732.7	46998.7
33	Kota Probolinggo	24975.6	26401.5	27609.7	28946.5	30369.1	27660.48
34	Kota Pasuruan	21299.9	22439.5	23596.8	24709	25873.4	23583.72
35	Kota Mojokerto	27393.3	28809.9	30269.8	31753.2	33398.3	30324.9
36	Kota Madiun	40125.5	42910.3	45672.4	48316.8	50994.9	45603.98
37	Kota Surabaya	94768.5	101368.1	107959.9	113815.6	120057.5	107593.9
38	Kota Batu	38385.3	40869.6	43162.8	45615.7	48200.2	43246.72
	Total 38 Kab/Kota	29504	31153.4	32837.5	34507.7	36364.4	32873.4
	Jawa Timur	29508.4	31092	32703.4	34272.3	35962.3	32707.68

## Lampiran F Hasil Perhitungan Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klasen

Kab/Kota dg total 38 Kab/Kota	ri	Yi	Perbandingan		Klasifikasi Wilayah
	Rata-rata	Rata-rata			
Pacitan	5.5425183	15634.34	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Ponorogo	5.3738663	12865.96	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Trenggalek	5.5050944	14555.38	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Tulungagung	5.6131058	20906.04	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Blitar	5.1679365	17503.34	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Kediri	5.4307346	14861.84	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Malang	5.7283217	20788.48	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Lumajang	5.2464447	17353.28	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Jember	5.7339391	17493.4	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Banyuwangi	6.211609	26494.34	ri > r	yi < y	Sedang Tumbuh
Bondowoso	5.3753798	14075.5	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Situbondo	5.4530606	15829.9	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Probolinggo	5.2030373	16508.12	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Pasuruan	6.4039725	50783.7	ri > r	yi > y	Maju Dan Tumbuh Cepat
Sidoarjo	6.2684307	50822.16	ri > r	yi > y	Maju Dan Tumbuh Cepat
Mojokerto	6.2630789	41291.4	ri > r	yi > y	Maju Dan Tumbuh Cepat
Jombang	5.6499189	17668.22	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Nganjuk	5.3638384	13663.52	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Madiun	5.5336399	15112.96	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Magetan	5.4431748	16458.68	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Ngawi	5.6447333	12910.32	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Bojonegoro	9.5615912	35881.52	ri > r	yi > y	Maju Dan Tumbuh Cepat
Tuban	5.4792067	30912.72	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Lamongan	6.3560755	17769.02	ri > r	yi < y	Sedang Tumbuh
Gresik	6.4169905	61481.8	ri > r	yi > y	Maju Dan Tumbuh Cepat
Bangkalan	0.7916594	17694.02	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Sampang	4.1259866	12668.58	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Pamekasan	5.7297525	10573.68	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Sumenep	6.8987954	19381.36	ri > r	yi < y	Sedang Tumbuh
Kota Kediri	5.1008235	249940.9	ri < r	yi > y	Maju Tertekan
Kota Blitar	6.0695443	26676.58	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Kota Malang	5.8936019	46998.7	ri < r	yi > y	Maju Tertekan
Kota Probolinggo	6.1244528	27660.48	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Kota Pasuruan	5.9043373	23583.72	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Kota Mojokerto	5.9260596	30324.9	ri < r	yi < y	Wilayah Relatif Tertinggal
Kota Madiun	6.6374227	45603.98	ri > r	yi > y	Maju Dan Tumbuh Cepat
Kota Surabaya	6.7706958	107593.92	ri > r	yi > y	Maju Dan Tumbuh Cepat
Kota Batu	6.9519719	43246.72	ri > r	yi > y	Maju Dan Tumbuh Cepat
	R	Y			
total Kab/Kota Jawa Timur	6.1374396	32873.4			

## Lampiran G Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

2012			
Yj-y	(yj-y)^2	pj/p	(yj-y)^2.pj/p
-15389.7	236842866.1	0.014326	3392948.695
-17855.8	318829593.6	0.022616	7210544.338
-16361.2	267688865.4	0.017889	4788807.02
-10593.8	112228598.4	0.026366	2958997.574
-13532.3	183123143.3	0.029665	5432304.833
-16008.8	256281677.4	0.039938	10235337.34
-10604.8	112461783	0.065366	7351184.696
-13732.9	188592542.4	0.026712	5037667.997
-13765.1	189477978	0.062128	11771866.82
-5854.8	34278683.04	0.041319	1416362.531
-16693.7	278679619.7	0.019632	5471173.04
-15198.5	230994402.3	0.017264	3987898.455
-14333.1	205437755.6	0.029297	6018608.749
15949.8	254396120	0.040511	10305753.98
16873.7	284721751.7	0.05293	15070263.97
7687.5	59097656.25	0.027551	1628217.112
-13513.5	182614682.3	0.032026	5848429.069
-17095.6	292259539.4	0.027001	7891284.203
-15850.3	251232010.1	0.017558	4411213.997
-14687.8	215731468.8	0.016385	3534740.432
-17872.3	319419107.3	0.021587	6895283.854
1675.9	2808640.81	0.032096	90146.86418
-1462.2	2138028.84	0.029774	63657.58031
-13834	191379556	0.031086	5949222.584
25995.5	675766020.3	0.031797	21487522.92
-12075.5	145817700.3	0.024353	3551152.844
-17429	303770041	0.023713	7203230.676
-19850.1	394026470	0.021458	8455007.5
-12782.1	163382080.4	0.027723	4529381.413
201351.2	40542305741	0.007182	291189171.5
-5475.7	29983290.49	0.003535	106003.6819
12863.6	165472205	0.0219	3623809.498
-4528.4	20506406.56	0.005833	119622.6198
-8204.1	67307256.81	0.004991	335932.3015
-2110.7	4455054.49	0.003217	14332.50653
10621.5	112816262.3	0.004537	511836.7273
65264.5	4259454960	0.073628	313615819.5
8881.3	78877489.69	0.005109	403012.8973
$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot P_j/P}}{Y}$	Jumlah		791907752.3
	Hasil		0.953797979

## Lampiran H Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

2013			
Yj-y	(yj-y)^2	pj/p	(yj-y)^2.pj/p
-16264.6	264537213.2	0.014282361	3778215.976
-18936.2	358579670.4	0.022518719	8074754.762
-17265.2	298087131	0.017824141	5313147.078
-11176.9	124923093.6	0.026311964	3286971.923
-14467.1	209296982.4	0.029629988	6201467.036
-16953.2	287410990.2	0.039895113	11466293.94
-11393.5	129811842.3	0.065393354	8488831.783
-14597.8	213095764.8	0.026687506	5686994.521
-14558.4	211947010.6	0.062075122	13156636.48
-6046.9	36564999.61	0.041252716	1508405.556
-17683.5	312706172.3	0.01962274	6136151.906
-16027.3	256874345.3	0.017222288	4423964.002
-15297.9	234025744.4	0.029278166	6851844.645
17053.7	290828683.7	0.040578242	11801316.63
17647.2	311423667.8	0.053410202	16633201.05
8181.5	66936942.25	0.027573512	1845686.55
-14358.9	206178009.2	0.032084945	6615210.077
-18134.8	328870971	0.026942412	8860577.151
-16785	281736225	0.017513739	4934254.826
-15502.7	240333707.3	0.016309981	3919838.315
-18912.3	357675091.3	0.021494221	7687947.537
645.4	416541.16	0.032002131	13330.20486
-1649.4	2720520.36	0.029755003	80949.09273
-14423.1	208025813.6	0.030925005	6433199.341
26962.6	726981798.8	0.031986413	23253540.07
-13869.1	192351934.8	0.024437407	4700582.468
-18428.9	339624355.2	0.023811859	8087087.347
-21031.1	442307167.2	0.021567729	9539561.194
-12101.3	146441461.7	0.027662216	4050895.396
205320.9	42156671977	0.007210531	303971982.7
-5753	33097009	0.003537297	117073.9381
13503.8	182352614.4	0.021916918	3996607.302
-4751.9	22580553.61	0.005835828	131776.2226
-8713.9	75932053.21	0.005012226	380588.6046
-2343.5	5491992.25	0.003227208	17723.79992
11756.9	138224697.6	0.004538569	627342.3003
70214.7	4930104096	0.073558237	362649766.8
9716.2	94404542.44	0.00511399	482783.8968
$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot P_j / P}}{Y}$		Jumlah	875206502.4
		Hasil	0.949619921

## Lampiran I Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

2014			
Yj-y	(yj-y)^2	pj/p	(yj-y)^2.pj/p
-17219.3	296504292.5	0.014231	4219700.149
-20011.7	400468136.9	0.022424	8980240.951
-18279.4	334136464.4	0.017788	5943469.944
-11907.2	141781411.8	0.026314	3730781.52
-15375.9	236418300.8	0.029546	6985312.914
-17963.3	322680146.9	0.039858	12861415.12
-12042.7	145026623.3	0.065451	9492177.595
-15444.8	238541847	0.026583	6341176.456
-15309.9	234393038	0.06202	14537076.08
-6387.2	40796323.84	0.041131	1677999.705
-18765.6	352147743.4	0.019606	6904184.757
-16963.1	287746761.6	0.01725	4963534.869
-16344	267126336	0.029337	7836564.272
18201.3	331287321.7	0.04065	13466849.26
18237.1	332591816.4	0.053973	17951112.21
8537.6	72890613.76	0.027725	2020926.53
-15184	230553856	0.031973	7371600.019
-19208.4	368962630.6	0.026877	9916576.139
-17748.9	315023451.2	0.017456	5499117.198
-16412.9	269383286.4	0.016229	4371884.37
-19934.7	397392264.1	0.021441	8520360.515
-433.4	187835.56	0.031919	5995.459813
-1872.5	3506256.25	0.02971	104169.7742
-15063.1	226896981.6	0.030745	6976026.091
28644.5	820507380.3	0.032158	26385581.46
-14472.9	209464834.4	0.024497	5131188.88
-20273.6	411018857	0.023981	9856640.503
-22258.5	495440822.3	0.021658	10730311.8
-12712.9	161617826.4	0.02764	4467183.766
216112.1	46704439766	0.007202	336366978.2
-6178.3	38171390.89	0.003546	135347.0755
14118.4	199329218.6	0.021911	4367424.367
-5227.8	27329892.84	0.005873	160522.1104
-9240.7	85390536.49	0.005007	427567.4867
-2567.7	6593083.29	0.00323	21297.03323
12834.9	164734658	0.004516	743981.5135
75122.4	5643374982	0.073398	414214248.4
10325.3	106611820.1	0.005144	548403.2527
$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot P_j/P}}{Y}$	Jumlah	984234927.7	
	Hasil	0.955386941	

## Lampiran J Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

2015			
Yj-y	(yj-y)^2	pj/p	(yj-y)^2.pj/p
-18138.3	328997927	0.014183	4666271.114
-21033.1	442391296	0.022328	9877765.893
-19270.4	371348316	0.017741	6588142.29
-12644.6	159885909	0.026287	4202938.032
-16238.6	263692130	0.029484	7774797.262
-18987.8	360536549	0.039819	14356315.92
-12765.8	162965650	0.065495	10673410.02
-16378.3	268248711	0.026519	7113649.792
-16136	260370496	0.061963	16133361.02
-6573.5	43210902.3	0.041034	1773129.713
-19820.9	392868077	0.019595	7698118.922
-17953.3	322320981	0.01724	5556656.467
-17347.7	300942695	0.029358	8835023.777
18859.2	355669425	0.040718	14482074.49
18395.9	338409137	0.054502	18444055.18
8802.5	77484006.3	0.027811	2154906.663
-16006.3	256201640	0.031945	8184359.163
-20227.8	409163893	0.026815	10971926.24
-18674.4	348733215	0.017404	6069209.683
-17255.7	297759182	0.016151	4809001.573
-20966.3	439585736	0.021334	9378225.438
3413.1	11649251.6	0.031832	370822.4072
-2192.6	4807494.76	0.029678	142676.4687
-15719.3	247096392	0.030576	7555168.252
30254.3	915322668	0.03234	29601131.65
-16791.2	281944397	0.024565	6926070.55
-21832.1	476640590	0.024115	11494090.5
-23485.7	551578104	0.02176	12002212.8
-14219.9	202205556	0.027598	5580458.585
226012	5.1081E+10	0.007208	368182782.1
-6538.8	42755905.4	0.00355	151782.5381
14772.4	218223802	0.021914	4782114.532
-5561.2	30926945.4	0.005895	182319.6199
-9798.7	96014521.7	0.005015	481499.1871
-2754.5	7587270.25	0.003236	24551.48713
13809.1	190691243	0.004505	858998.9481
79307.9	6289743002	0.073327	461209263.3
11108	123387664	0.005161	636780.6673
$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot P_j/P}}{Y}$	Jumlah	1089926062	
	Hasil	0.956714828	

## Lampiran K Hasil Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

2016			
Yj-y	(yj-y)^2	pj/p	(yj-y)^2.pj/p
-19183.4	368002836	0.014134	5201529.148
-22200.4	492857760	0.022234	10958414.75
-20413.9	416727313	0.017691	7372498.717
-13514.3	182636304	0.02626	4795970.971
-17236.4	297093485	0.029423	8741395.314
-20144.7	405808938	0.039779	16142824.63
-13617.8	185444477	0.065532	12152557.61
-17446.8	304390830	0.026454	8052385.63
-17130.6	293457456	0.061906	18166879.73
-7032.9	49461682.4	0.040942	2025055.299
-21025.8	442084266	0.01958	8656038.475
-19075.3	363867070	0.01723	6269589.142
-18503.7	342386914	0.02938	10059187.63
19487.5	379762656	0.040785	15488648.37
18589.9	345584382	0.055035	19019068.51
8880.9	78870384.8	0.027897	2200238.011
-16963.2	287750154	0.031921	9185162.751
-21382.8	457224136	0.026753	12232087.57
-19743.6	389809741	0.017351	6763589.191
-18214.5	331768010	0.016071	5331905.098
-22129.8	489728048	0.021228	10395855.18
9739.6	94859808.2	0.031744	3011184.536
-2626.7	6899552.89	0.029645	204535.6773
-16482.4	271669510	0.030408	8260897.099
31185.1	972510462	0.032519	31625494.1
-18688.2	349248819	0.024639	8605144.606
-23060.5	531786660	0.024251	12896392.17
-24873.2	618676078	0.02186	13524436.04
-15644	244734736	0.027557	6744224.243
236541.3	5.5952E+10	0.007216	403764849.9
-7038.3	49537666.9	0.00356	176366.0857
15368.3	236184645	0.021917	5176458.219
-5995.3	35943622.1	0.005915	212590.405
-10491	110061081	0.005021	552632.635
-2966.1	8797749.21	0.003235	28459.79182
14630.5	214051530	0.004494	961965.4729
83693.1	7004534988	0.073254	513109276.6
11835.8	140086162	0.005178	725322.6331
$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \cdot P_j/P}}{Y}$		Jumlah	1208791112
		Hasil	0.95609094